



Katalog BPS : 7203002

# Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi

*Financial Statistics of Province Governance*

## 2008-2011



**BADAN PUSAT STATISTIK**



# **Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi**

*Financial Statistics of Province Governance*



# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI 2008-2011

*Financial Statistics of Province Governance 2008-2011*

**ISSN : 0126-7906**

**No. Publikasi / Publication Number : 06310.1101**

**Katalog BPS / BPS Catalogue : 7203002**

**Ukuran Buku / Book Size : 29,7 cm x 21 cm**

**Naskah / Manuscript :**

**Subdirektorat Statistik Keuangan**

*Subdirectorate of Financial Statistics*

**Gambar Kulit / Cover Design :**

**Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik**

*Sub Directorate of Statistical Compilation and Publication*

**Diterbitkan oleh / Published by :**

**Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia**

*BPS - Statistics Indonesia*

**Dicetak oleh / Printed by :**

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

*May be cited with reference to the source*

<http://www.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Survei Keuangan Daerah seluruh Indonesia. Data keuangan provinsi dikumpulkan dari kantor Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia melalui BPS provinsi masing-masing.

Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi, untuk periode tahun 2008-2011. Data tahun 2008-2010 merupakan data realisasi APBD, sedangkan data tahun 2011 masih merupakan data APBD.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Jakarta, Maret 2012

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc.



## DAFTAR ISI/CONTENTS

	<b><u>HALAMAN</u></b>
	<b><u>PAGE</u></b>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i> .....	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i> .....	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i> .....	vii
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i> .....	xix

### **TABEL**

#### **TABLE**

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Receipt and Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2008-2011</i> .....	3
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan / <i>Actual Receipts of Provincial Government Throughout Indonesia by Receipt Items 2008-2011</i> .....	9
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Revenue of Provincial Government Throughout Indonesia 2008-2011</i> .....	45
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Receipt of Provincial Government Throughout Indonesia 2008-2011</i> .....	57
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran / <i>Actual Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2008-2011</i> .....	61

## DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u> <i>TABLE</i>	<u>HALAMAN</u> <i>PAGE</i>
5A. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Direct Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2008-2011</i> .....	97
5B. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2008-2011</i> .....	106
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Financing Expenditure of Provincial Government Throughout Indonesia 2008-2011</i> .....	110



## I. PENJELASAN UMUM

### I.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi secara umum memuat data tentang Penerimaan dan Pengeluaran seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia selama empat periode tahun anggaran, yaitu tahun 2008 sampai dengan 2011.

Beberapa indikator/informasi penting yang dimuat dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi ini, antara lain:

- a. Informasi tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi.
- b. Informasi tentang potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing provinsi.
- c. Informasi untuk menentukan jenis dan besaran bantuan bagi masing-masing provinsi, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai potensi dan kemampuan dari masing-masing provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah di wilayah masing-masing.

### I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur masing-masing provinsi menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1.

### **I.3. Konsep dan Definisi**

#### **Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi**

Adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

#### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

#### **Retribusi Daerah**

Yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek dan lain-lain.

### **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

### **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Yaitu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

### **Bagi Hasil Bukan Pajak**

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi

sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

### **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas.

### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah terdiri dari :

2. Belanja Tidak Langsung
3. Belanja Langsung

### **Belanja Tidak Langsung**

Adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Belanja Pegawai Tidak Langsung**

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

### **Belanja Bunga**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### **Belanja Subsidi**

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

### **Belanja Hibah**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

### **Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan**

Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

### **Bantuan Partai Politik**

Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

### **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

### **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

### **Belanja Tidak Terduga**

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### **Belanja Pegawai Langsung**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### **Belanja Barang dan Jasa**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

### **Belanja Modal**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

### **Pembiayaan Daerah**

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan



maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah ;
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
  - b. Transfer dari Dana Cadangan
  - c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
  - d. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ;
  - a. Transfer ke Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal
  - c. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
  - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

#### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu**

Adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

#### **Pencairan Dana Cadangan**

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

#### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

**Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

**Pembentukan Dana Cadangan**

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

**Pembayaran Pokok Utang**

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**Pemberian Pinjaman Daerah**

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan**

Adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

<http://www.bps.go.id>



## II. URAIAN RINGKAS

### II.1. Keuangan Pemerintah Provinsi

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menciptakan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta kemampuan yang handal dan profesional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan sumbangan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. APBD Provinsi harus mampu merangsang dan mendukung program pembangunan di tingkat kabupaten/kota di bawahnya.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam mendanai penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, pengelolaan APBD Provinsi harus selalu disempurnakan agar dapat dihimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

## **II.2. Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah berasal dari berbagai macam sumber dan secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
  - a. Bagi Hasil Pajak
  - b. Bagi Hasil Bukan Pajak
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tabel A menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2008-2010 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan dari 96.698 miliar rupiah pada tahun 2008, menjadi 98.900 miliar rupiah pada tahun 2009 dan 116.802 miliar rupiah pada tahun 2010. Peningkatan ini selain disebabkan oleh naiknya penerimaan yang berasal dari dana perimbangan, juga karena adanya berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi sejak tahun 2008. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah berdampak pula terhadap perkembangan basis penerimaan daerah yang ada. Pada tahun 2009 pendapatan daerah secara umum tumbuh sebesar 2,28 persen namun pada tahun 2010 terjadi

peningkatannya sebesar 12,10 persen, dan pada tahun 2011 secara umum pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik sebesar 1,91 persen menjadi sebesar 119.037 miliar rupiah.

**Tabel A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (miliar rupiah), 2008 – 2011**

No.	Jenis Pendapatan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	44 487	45 406	56 727	59 547
a.	Pajak Daerah	38 043	37 668	47 301	50 202
b.	Retribusi Daerah	1 894	1 572	1 455	1 236
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 301	1 608	1 933	2 244
d.	Lain-lain PAD yang Sah	3 249	4 558	6 038	5 865
2.	Dana Perimbangan	42 993	42 598	47 520	46 774
a.	Bagi Hasil Pajak	14 825	15 410	17 557	15 356
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 511	7 178	9 896	8 329
c.	Dana Alokasi Umum	17 951	18 650	19 247	21 895
d.	Dana Alokasi Khusus	706	1 360	820	1 194
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9 219	10 895	12 556	12 715
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>96 698</b>	<b>98 900</b>	<b>116 802</b>	<b>119 037</b>

\*) Data APBD

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. PAD seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, berarti daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Selama periode tahun 2008-2010, perkembangan PAD terus mengalami kenaikan, dari 44.487 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi masing-masing sebesar 45.406 miliar rupiah dan 56.727 miliar rupiah pada tahun 2009 dan 2010. Peningkatan ini didukung oleh

penerimaan pajak daerah pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2009 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Peran kedua terbesar setelah pajak daerah yaitu dari lain-lain PAD yang sah, kemudian retribusi daerah, dan penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada awalnya penerimaan retribusi daerah lebih besar dari penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun nampaknya peranan retribusi daerah mulai tergantikan. Pada tahun 2011, PAD ditargetkan naik menjadi 59.547 miliar rupiah.

**Tabel B. Sebaran Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian, 2008 – 2011**

Kategori Kemandirian	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rendah Sekali (0-25 %)	7	9	7	7
Rendah (>25-50 %)	15	15	14	15
Sedang (>50-75 %)	11	9	12	10
Tinggi (>75%)	0	0	0	1
Jumlah	33	33	33	33

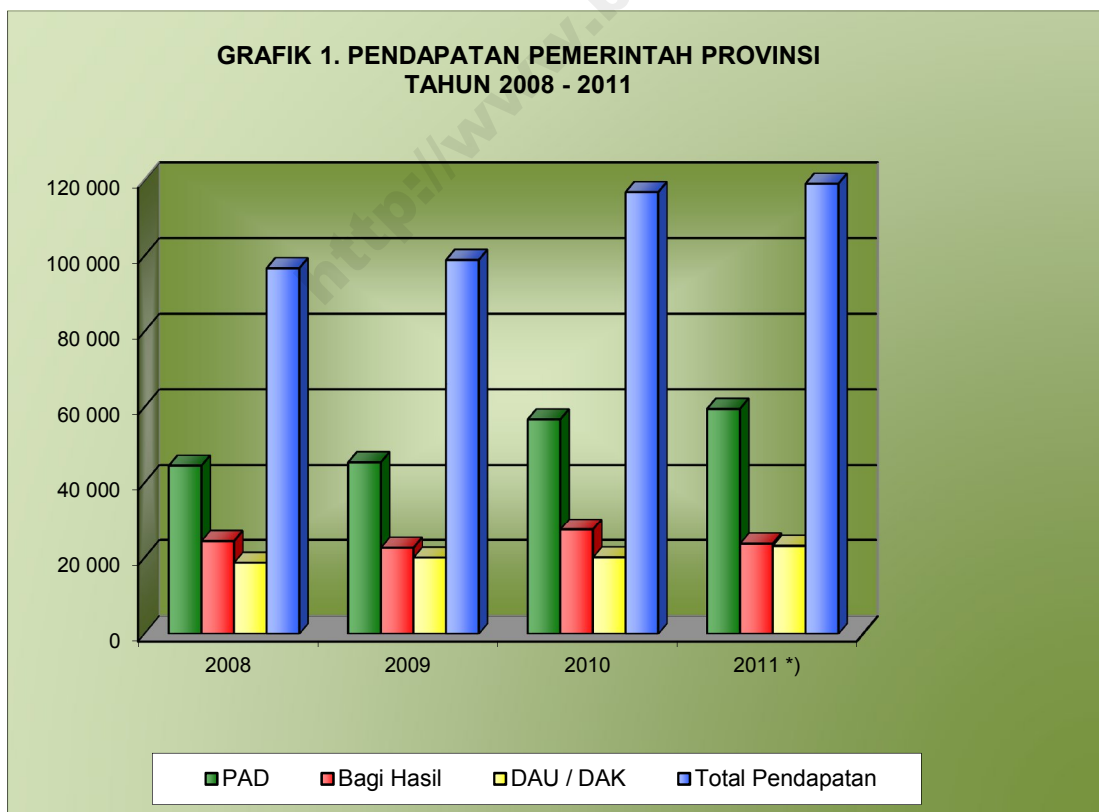
\*) APBD

PAD ketika dibandingkan dengan transfer dari pemerintah selalu memiliki keterkaitan dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Sebagai gambaran awal adalah semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “**rendah sekali**”, dapat dikatakan bahwa pemerintah Pusat memiliki peranan yang dominan dari



pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah”, sebenarnya pada taraf ini campur tangan pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Melihat besaran kontribusi PAD yang masih pada kisaran 40 sampai dengan 50 persen, maka secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia masih dikategorikan rendah, namun mendekati sedang. Dari tahun ke tahun mulai 2008 sampai dengan 2010 tingkat kemandirian keuangan provinsi mengalami penurunan dan peningkatan, tapi cenderung meningkat. Sedangkan pada tahun 2011 Anggaran pemerintah optimis pada peningkatan kemandirian daerah.



Selain dari PAD, sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah tetapi dikelola oleh pemerintah pusat adalah beberapa komponen pajak dan beberapa sumber daya alam, yang sebagian pendapatannya dikembalikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, begitu juga bagi hasil sumber daya alamnya. Pendapatan keduanya sebesar 24.336 miliar rupiah pada tahun 2008, turun menjadi 22.588 miliar rupiah pada tahun 2009 lalu meningkat menjadi 27.543 miliar rupiah pada tahun 2010. Sedangkan anggaran pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam pada tahun 2011 tidak begitu optimis dengan menetapkan anggaran sebesar 23.685 miliar rupiah.

**Tabel C. Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Persen), 2008 – 2011**

No.	Jenis Pendapatan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	46.01	45.91	48.57	50.02
a.	Pajak Daerah	39.34	38.09	40.50	42.17
b.	Retribusi Daerah	1.96	1.59	1.25	1.04
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.35	1.63	1.65	1.89
d.	Lain-lain PAD yang Sah	3.36	4.61	5.17	4.93
2.	Dana Perimbangan	44.46	43.07	40.68	39.29
a.	Bagi Hasil Pajak	15.33	15.58	15.03	12.90
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9.84	7.26	8.47	7.00
c.	Dana Alokasi Umum	18.56	18.86	16.48	18.39
d.	Dana Alokasi Khusus	0.73	1.38	0.70	1.00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.53	11.02	10.75	10.68
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

Melalui Tabel C dapat dilihat bahwa mulai tahun 2008 persentase pendapatan yang berasal dari PAD cenderung meningkat dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Tetapi jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat menandakan ketergantungan pemerintah daerah hanya kurang dari 20 persen. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, masing-masing sebesar 46,01 persen dan 45,91 persen pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2010, kontribusi PAD tumbuh menjadi 48,57 persen dan pada tahun 2011 pemerintah daerah menganggarkan bahwa kontribusi PAD kembali tumbuh menjadi sebesar 50,02 persen, sekaligus mengoreksi tingkat kemandirian dari “rendah” menjadi “sedang”, yang berarti bahwa target pemerintah ditahun 2011 lebih mandiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sumber penerimaan yang dikategorikan kedalam PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang paling dominan. Tahun 2008 sampai tahun 2010 besarnya kontribusi adalah 39,34 persen, 38,09 persen dan 30,50 persen.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan memiliki kecenderungan menurun dengan kontribusi sebesar 44,46 persen, 43,07 persen dan 40,68 persen pada tahun 2008, 2009 dan 2010, sedangkan pada tahun 2011 dianggarkan menjadi 39,29 persen. Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu dana bagi hasil berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Satu bagian yang lain adalah dana alokasi yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

Dana bagi hasil digunakan untuk memperkecil kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*), artinya menutup kesenjangan antara pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan dana alokasi umum digunakan sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Dari sisi pembelanjaan, dana-dana transfer tersebut tidak dibatasi untuk jenis belanja tertentu saja, namun daerah memiliki otoritas penuh untuk mengalokasikannya.

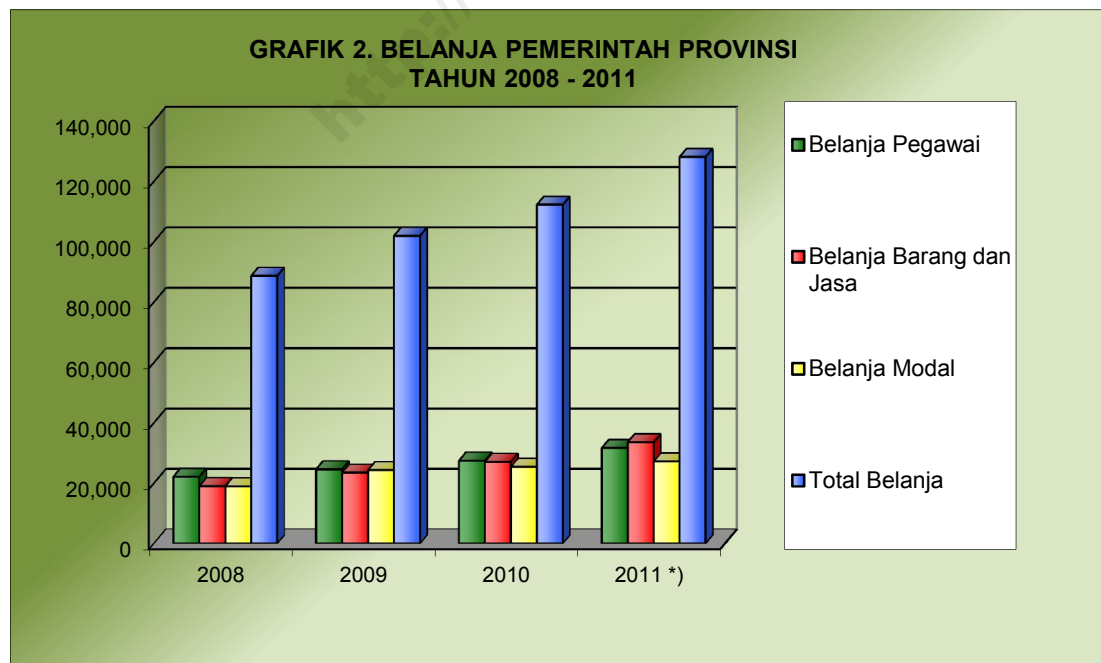
Lain-lain pendapatan yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan

pendapatan daerah yang paling kecil kontribusinya terhadap total pendapatan, yang mana pada tahun 2008 hanya sebesar 9,53 persen sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 11,02 persen dan 19,75 persen.

### II.3. Belanja Daerah

Dana yang diperoleh Pemerintah Provinsi secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah. Namun setelah diterapkannya sistem anggaran berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Secara umum realisasi belanja daerah pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2008, yaitu dari 88.610 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 101.884 miliar rupiah dan 112.153 miliar rupiah pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatannya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun pada bagian belanja langsung.



Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2008 secara umum daerah memperoleh surplus pendapatan, namun pada tahun 2009 dan 2010 terjadi defisit, walaupun defisit ini masih dapat di diselesaikan menggunakan pendapatan pembiayaan. Pada anggaran tahun 2011 diperkirakan belanja daerah sebesar 128.025 miliar rupiah, dan diperkirakan masih defisit sehingga harus menggunakan pendapatan pembiayaan untuk menutup kekurangannya. Secara rinci terangkum pada Tabel D.

**Tabel D. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (miliar rupiah), 2008 - 2011**

No.	Jenis Belanja	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>45 398</b>	<b>48 150</b>	<b>53 152</b>	<b>61 366</b>
1.	Belanja Pegawai	16 666	18 452	20 693	25 498
2.	Belanja Bunga	27	11	9	9
3.	Belanja Subsidi	60	116	65	102
4.	Belanja Hibah	5 386	2 950	4 428	6 354
5.	Belanja Bantuan Sosial	4 671	4 264	3 627	3 456
6.	Belanja Bagi Hasil	10 596	11 977	13 628	14 041
7.	Belanja Bantuan Keuangan	7 785	10 183	10 552	11 278
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	207	197	150	629
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>43 212</b>	<b>53 734</b>	<b>59 001</b>	<b>66 659</b>
1.	Belanja Pegawai	5 372	6 075	6 670	6 075
2.	Belanja Barang dan Jasa	18 943	23 412	26 992	33 475
3.	Belanja Modal	18 897	24 247	25 339	27 109
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>88 610</b>	<b>101 884</b>	<b>112 153</b>	<b>128 025</b>

\*) Data APBD

Dilihat dari struktur belanja dapat dilihat bahwa komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai yaitu 22.038 miliar rupiah pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sebesar 24.527 miliar rupiah, lalu pada tahun 2010 menjadi

27.363 miliar rupiah. Nilai tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 meningkat 11,29 persen, dan tahun 2010 meningkat 11,56 persen. Sedangkan tahun 2011 belanja pegawai diperkirakan terus meningkat sebesar 15,39 persen. Komponen belanja pegawai tersebut merupakan gabungan dari belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tak langsung.

Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja barang dan jasa yaitu sebesar 18.943 miliar rupiah, 23.412 miliar rupiah dan 26.992 miliar rupiah pada tahun 2008, 2009 dan 2010, artinya pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 23,59 persen, lalu 15,29 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 belanja barang jasa dianggarkan sebesar 33.475 miliar rupiah atau 24,02 persen lebih tinggi dari realisasi 2010. Belanja modal juga memiliki nilai yang cukup besar yaitu 18.897 miliar rupiah pada tahun 2008, 24.247 miliar rupiah pada tahun 2009, dan 25.339 miliar rupiah pada tahun 2010 atau naik sebesar 28,31 persen dan 4,50 persen.

**Tabel E. Kontribusi Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (Persen), 2008 – 2011**

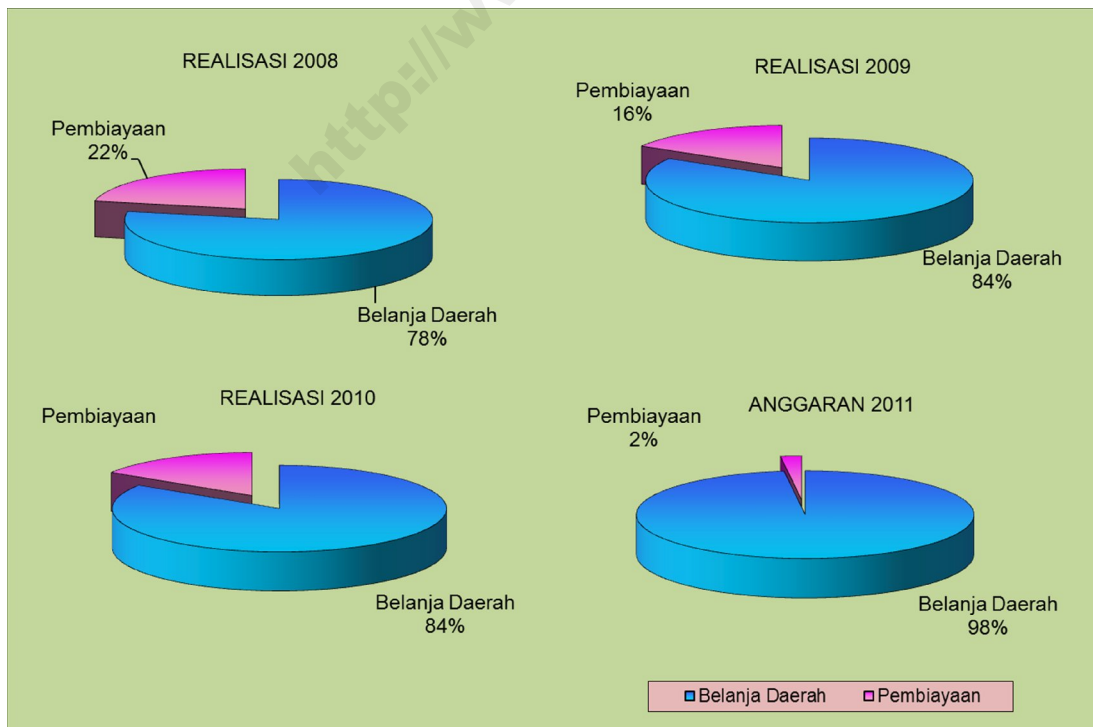
No.	Jenis Belanja	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>51.23</b>	<b>47.26</b>	<b>47.39</b>	<b>47.93</b>
1.	Belanja Pegawai	18.81	18.11	18.45	19.92
2.	Belanja Bunga	0.03	0.01	0.01	0.01
3.	Belanja Subsidi	0.07	0.11	0.06	0.08
4.	Belanja Hibah	6.08	2.90	3.95	4.96
5.	Belanja Bantuan Sosial	5.27	4.19	3.23	2.70
6.	Belanja Bagi Hasil	11.96	11.76	12.15	10.97
7.	Belanja Bantuan Keuangan	8.79	9.99	9.41	8.81
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0.23	0.19	0.13	0.49
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>48.77</b>	<b>52.74</b>	<b>52.61</b>	<b>52.07</b>
1.	Belanja Pegawai	6.06	5.96	5.95	4.75
2.	Belanja Barang dan Jasa	21.38	22.98	24.07	26.15
3.	Belanja Modal	21.33	23.80	22.59	21.17
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

Dalam struktur belanja daerah terlihat bahwa belanja langsung memiliki kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan belanja tak langsung. Pada tahun 2008 kontribusi belanja langsung sebesar 48,77 persen memang lebih kecil dibandingkan kontribusi belanja tak langsung, tetapi kemudian pada tahun 2009 dan 2010 kontribusinya lebih dominan yaitu sebesar 52,74 persen dan 52,61 persen. Sedangkan belanja tak langsung pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 51,23 persen, menjadi 47,26 persen pada tahun 2009 dan 47,39 persen pada tahun 2010.

Dalam struktur belanja tak langsung pada tahun 2008 dan 2009, peranan belanja pegawai terlihat dominan yaitu masing-masing sebesar 18,81 persen, dan 18,11 persen, lalu pada tahun 2010 kontribusinya menjadi 18,45 persen. Sedangkan pada belanja langsung yang awalnya didominasi oleh belanja modal, namun pada tahun 2010 didominasi oleh belanja barang dan jasa.

**GRAFIK 3. PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI  
TAHUN 2008 – 2011**



Realisasi belanja daerah dilihat dari sisi penyerapan mencapai 78,18 persen pada tahun 2008 kemudian meningkat menjadi 83,59 persen pada tahun 2009, dan naik menjadi 84,03 persen pada tahun 2010. Sedangkan target penyerapan pada anggaran 2010 mencapai 98,00 persen.

#### **II.4. Kesimpulan**

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah dari tahun 2008 sampai tahun 2010 terus mengalami kenaikan, seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi dalam beberapa aspek serta kinerja ekonomi yang bergerak ke arah yang lebih positif dan lebih baik dari pada tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2010 mencapai 116.802 miliar rupiah atau meningkat sebesar 18,10 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi maupun angka inflasi, namun kinerja pemerintah dapat dikatakan belum maksimal jika dilihat dari sisi penyerapan yang hanya 84 persen.

Kontribusi terbesar pada belanja daerah terdapat pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, yang pada tahun 2010 mencapai 24,40 persen; 24,07 persen dan 22,59 persen, atau dapat dikatakan bahwa 71,06 persen belanja daerah digunakan untuk ketiga komponen tersebut di atas.



TABEL  

---

TABLE 1.

<http://www.bps.go.id>



**TABEL 1.a REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2008**  
**TABLE ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	6 911 764 845	3 141 732 122	10 053 496 967	5 715 623 666	4 337 873 301	10 053 496 967
2.	Sumatera Utara	3 225 853 317	394 258 830	3 620 112 147	2 967 350 795	652 761 352	3 620 112 147
3.	Sumatera Barat	1 723 767 565	258 039 339	1 981 806 904	1 637 700 489	344 106 415	1 981 806 904
4.	R i a u	4 164 943 199	466 019 841	4 630 963 040	3 657 889 820	973 073 220	4 630 963 040
5.	J a m b i	1 436 381 400	359 487 858	1 795 869 258	1 404 982 484	390 886 774	1 795 869 258
6.	Sumatera Selatan	2 574 429 820	101 043 442	2 675 473 262	2 386 788 811	288 684 451	2 675 473 262
7.	Bengkulu	1 082 518 266	445 850 386	1 528 368 652	1 249 666 188	278 702 464	1 528 368 652
8.	Lampung	1 723 036 643	180 319 738	1 903 356 381	1 711 015 163	192 341 218	1 903 356 381
9.	Bangka Belitung	840 122 439	254 692 423	1 094 814 862	775 348 992	319 465 870	1 094 814 862
10.	Kepulauan Riau	1 356 574 432	184 315 626	1 540 890 058	1 148 936 845	391 953 213	1 540 890 058
11.	DKI Jakarta	19 221 757 881	1 364 256 321	20 586 014 202	15 956 526 086	4 629 488 116	20 586 014 202
12.	Jawa Barat	7 275 007 134	1 350 314 356	8 625 321 490	6 110 959 797	2 514 361 693	8 625 321 490
13.	Jawa Tengah	5 203 414 609	848 298 788	6 051 713 397	5 162 662 476	889 050 921	6 051 713 397
14.	D I Yogyakarta	1 258 609 946	537 060 364	1 795 670 310	1 453 286 282	342 384 028	1 795 670 310
15.	Jawa Timur	7 075 105 413	1 723 922 045	8 799 027 458	6 203 660 594	2 595 366 864	8 799 027 458
16.	Banten	2 351 380 505	149 104 130	2 500 484 635	2 253 982 712	246 501 923	2 500 484 635
17.	B a l i	1 667 342 648	282 503 094	1 949 845 742	1 464 226 342	485 619 400	1 949 845 742
18.	Nusa Tenggara Barat	1 066 716 532	71 073 304	1 137 789 836	1 042 946 465	94 843 371	1 137 789 836
19.	Nusa Tenggara Timur	946 026 752	310 377 666	1 256 404 418	984 233 461	272 170 957	1 256 404 418
20.	Kalimantan Barat	1 474 197 546	134 331 750	1 608 529 296	1 360 959 910	247 569 386	1 608 529 296
21.	Kalimantan Tengah	1 246 835 944	205 554 131	1 452 390 075	1 276 361 391	176 028 684	1 452 390 075
22.	Kalimantan Selatan	1 875 797 122	269 666 395	2 145 463 517	1 545 693 966	599 769 551	2 145 463 517
23.	Kalimantan Timur	6 127 503 221	2 361 237 901	8 488 741 122	6 356 384 491	2 132 356 631	8 488 741 122
24.	Sulawesi Utara	965 147 321	385 989 059	1 351 136 380	913 982 712	437 153 668	1 351 136 380
25.	Sulawesi Tengah	1 042 484 623	108 000 559	1 150 485 182	954 733 636	195 751 546	1 150 485 182
26.	Sulawesi Selatan	2 133 624 783	208 669 551	2 342 294 334	2 134 520 569	207 773 765	2 342 294 334
27.	Sulawesi Tenggara	957 848 767	61 603 700	1 019 452 467	899 241 856	120 210 611	1 019 452 467
28.	Gorontalo	536 574 283	128 731 650	665 305 933	537 171 736	128 134 197	665 305 933
29.	Sulawesi Barat	510 759 425	70 248 928	581 008 353	520 189 772	60 818 581	581 008 353
30.	M a l u k u	786 335 010	62 415 818	848 750 828	780 644 636	68 106 192	848 750 828
31.	Maluku Utara	676 545 728	26 220 676	702 766 404	645 497 728	57 268 676	702 766 404
32.	Papua Barat	1 502 766 461	193 508 717	1 696 275 178	1 646 990 743	49 284 435	1 696 275 178
33.	P a p u a	5 757 078 135	0	5 757 078 135	5 750 667 126	6 411 009	5 757 078 135
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>96 698 251 715</b>	<b>16 638 848 508</b>	<b>113 337 100 223</b>	<b>88 610 827 740</b>	<b>24 726 272 483</b>	<b>113 337 100 223</b>

**TABEL** 1.b **REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2009**  
**TABLE** 1.b **ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2009**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	6 042 467 779	4 015 380 289	10 057 848 068	7 642 847 005	2 415 001 063	10 057 848 068
2.	Sumatera Utara	3 212 558 700	610 590 952	3 823 149 652	3 444 560 582	378 589 070	3 823 149 652
3.	Sumatera Barat	2 026 241 165	314 029 282	2 340 270 447	1 657 403 919	682 866 528	2 340 270 447
4.	R i a u	3 231 912 094	871 076 872	4 102 988 966	3 757 480 844	345 508 122	4 102 988 966
5.	J a m b i	1 353 900 464	386 301 605	1 740 202 069	1 530 073 192	210 128 877	1 740 202 069
6.	Sumatera Selatan	2 397 685 724	288 684 451	2 686 370 175	2 341 327 091	345 043 084	2 686 370 175
7.	Bengkulu	914 357 986	218 702 463	1 133 060 449	932 490 304	200 570 145	1 133 060 449
8.	Lampung	1 742 386 840	183 672 386	1 926 059 226	1 847 107 848	78 951 378	1 926 059 226
9.	Bangka Belitung	804 845 143	315 545 870	1 120 391 013	854 254 243	266 136 770	1 120 391 013
10.	Kepulauan Riau	1 459 000 000	391 953 213	1 850 953 213	1 848 353 213	2 600 000	1 850 953 213
11.	DKI Jakarta	19 251 893 888	4 446 373 058	23 698 266 946	19 500 311 731	4 197 955 215	23 698 266 946
12.	Jawa Barat	7 785 889 984	2 457 196 766	10 243 086 750	8 193 613 910	2 049 472 840	10 243 086 750
13.	Jawa Tengah	5 696 660 052	683 817 617	6 380 477 669	5 200 113 113	1 180 364 556	6 380 477 669
14.	D I Yogyakarta	1 286 067 485	285 824 679	1 571 892 164	1 327 487 848	244 404 316	1 571 892 164
15.	Jawa Timur	7 827 694 815	2 061 246 529	9 888 941 344	7 602 038 808	2 286 902 536	9 888 941 344
16.	Banten	2 436 096 122	237 720 327	2 673 816 449	2 420 820 941	252 995 508	2 673 816 449
17.	B a l i	1 902 227 543	468 108 450	2 370 335 993	1 811 099 336	559 236 657	2 370 335 993
18.	Nusa Tenggara Barat	1 173 506 085	63 928 652	1 237 434 737	1 100 537 892	136 896 845	1 237 434 737
19.	Nusa Tenggara Timur	1 023 505 681	268 175 864	1 291 681 545	1 025 445 818	266 235 727	1 291 681 545
20.	Kalimantan Barat	1 577 890 709	222 153 924	1 800 044 633	1 627 012 304	173 032 329	1 800 044 633
21.	Kalimantan Tengah	1 367 412 136	145 923 582	1 513 335 718	1 471 278 248	42 057 470	1 513 335 718
22.	Kalimantan Selatan	2 109 410 863	549 419 700	2 658 830 563	2 105 293 055	553 537 508	2 658 830 563
23.	Kalimantan Timur	5 348 926 268	2 007 208 728	7 356 134 996	6 309 258 861	1 046 876 135	7 356 134 996
24.	Sulawesi Utara	1 023 349 288	399 104 168	1 422 453 456	1 034 427 882	388 025 574	1 422 453 456
25.	Sulawesi Tengah	1 052 332 635	189 511 577	1 241 844 212	1 059 732 420	182 111 792	1 241 844 212
26.	Sulawesi Selatan	2 175 750 141	183 706 090	2 359 456 231	2 122 191 791	237 264 440	2 359 456 231
27.	Sulawesi Tenggara	1 030 720 131	124 465 203	1 155 185 334	1 119 700 385	35 484 949	1 155 185 334
28.	Gorontalo	561 186 326	123 276 331	684 462 657	619 327 894	65 134 763	684 462 657
29.	Sulawesi Barat	554 240 280	59 884 225	614 124 505	590 163 812	23 960 693	614 124 505
30.	M a l u k u	1 008 730 045	64 679 783	1 073 409 828	1 015 807 645	57 602 183	1 073 409 828
31.	Maluku Utara	685 771 448	81 106 646	766 878 094	759 516 144	7 361 950	766 878 094
32.	Papua Barat	2 822 594 303	49 003 746	2 871 598 049	2 719 348 870	152 249 179	2 871 598 049
33.	P a p u a	6 012 822 338	225 000 000	6 237 822 338	5 294 198 938	943 623 400	6 237 822 338
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>98 900 034 461</b>	<b>22 992 773 028</b>	<b>121 892 807 489</b>	<b>101 884 625 887</b>	<b>20 008 181 602</b>	<b>121 892 807 489</b>

**TABEL 1.c REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2010**  
**TABLE 1.c ACTUAL RECEIPT AND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2010**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	6 967 815 083	1 842 988 678	8 810 803 761	7 528 516 368	1 282 287 393	8 810 803 761
2.	Sumatera Utara	3 885 636 140	346 533 462	4 232 169 602	3 666 706 174	565 463 428	4 232 169 602
3.	Sumatera Barat	1 920 971 383	673 887 321	2 594 858 704	2 239 753 492	355 105 212	2 594 858 704
4.	R i a u	4 346 845 188	114 587 470	4 461 432 658	4 267 432 658	194 000 000	4 461 432 658
5.	J a m b i	1 640 185 858	201 204 877	1 841 390 735	1 488 130 350	353 260 385	1 841 390 735
6.	Sumatera Selatan	3 224 159 595	315 250 644	3 539 410 239	3 108 036 632	431 373 607	3 539 410 239
7.	Bengkulu	1 000 860 633	10 570 146	1 011 430 779	971 198 561	40 232 218	1 011 430 779
8.	Lampung	2 091 684 131	79 029 066	2 170 713 197	2 004 899 187	165 814 010	2 170 713 197
9.	Bangka Belitung	848 025 113	264 129 736	1 112 154 849	862 715 774	249 439 075	1 112 154 849
10.	Kepulauan Riau	1 853 589 773	242 173 799	2 095 763 572	1 723 574 713	372 188 859	2 095 763 572
11.	DKI Jakarta	23 025 986 993	3 748 512 147	26 774 499 140	21 552 895 839	5 221 603 301	26 774 499 140
12.	Jawa Barat	9 742 187 781	1 789 756 684	11 531 944 465	9 020 608 021	2 511 336 444	11 531 944 465
13.	Jawa Tengah	6 626 316 989	904 356 288	7 530 673 277	5 968 033 770	1 562 639 507	7 530 673 277
14.	D I Yogyakarta	1 374 205 096	256 568 355	1 630 773 451	1 354 594 058	276 179 393	1 630 773 451
15.	Jawa Timur	9 980 544 750	1 995 753 452	11 976 298 202	10 206 317 103	1 769 981 099	11 976 298 202
16.	Banten	3 139 437 626	235 495 508	3 374 933 134	2 834 570 528	540 362 606	3 374 933 134
17.	B a l i	2 237 707 339	538 452 871	2 776 160 210	1 985 850 057	790 310 153	2 776 160 210
18.	Nusa Tenggara Barat	1 272 218 059	73 514 841	1 345 732 900	1 275 746 585	69 986 315	1 345 732 900
19.	Nusa Tenggara Timur	1 088 071 459	224 112 521	1 312 183 980	1 148 082 390	164 101 590	1 312 183 980
20.	Kalimantan Barat	1 778 927 314	173 009 098	1 951 936 412	1 700 202 329	251 734 083	1 951 936 412
21.	Kalimantan Tengah	1 555 426 286	57 885 383	1 613 311 669	1 477 348 175	135 963 494	1 613 311 669
22.	Kalimantan Selatan	2 279 776 309	492 660 308	2 772 436 617	2 410 095 344	362 341 273	2 772 436 617
23.	Kalimantan Timur	7 044 556 875	808 568 904	7 853 125 779	5 918 568 095	1 934 557 684	7 853 125 779
24.	Sulawesi Utara	1 158 671 349	347 025 574	1 505 696 923	1 137 423 445	368 273 478	1 505 696 923
25.	Sulawesi Tengah	1 177 609 898	177 052 220	1 354 662 118	1 127 256 721	227 405 397	1 354 662 118
26.	Sulawesi Selatan	2 564 075 935	230 448 199	2 794 524 134	2 486 159 765	308 364 369	2 794 524 134
27.	Sulawesi Tenggara	1 055 173 630	106 197 607	1 161 371 237	1 125 687 951	35 683 286	1 161 371 237
28.	Gorontalo	593 415 093	65 070 534	658 485 627	567 080 442	91 405 185	658 485 627
29.	Sulawesi Barat	610 378 110	23 221 030	633 599 140	607 672 166	25 926 974	633 599 140
30.	M a l u k u	952 660 802	58 385 591	1 011 046 393	950 281 175	60 765 218	1 011 046 393
31.	Maluku Utara	695 828 538	2 872 955	698 701 493	682 723 184	15 978 309	698 701 493
32.	Papua Barat	3 407 802 988	129 160 000	3 536 962 988	3 104 771 915	432 191 073	3 536 962 988
33.	P a p u a	5 661 736 549	142 102 552	5 803 839 101	5 650 474 892	153 364 209	5 803 839 101
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>116 802 488 665</b>	<b>16 670 537 821</b>	<b>133 473 026 486</b>	<b>112 153 407 859</b>	<b>21 319 618 627</b>	<b>133 473 026 486</b>

**TABEL** 1.d **ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2011**  
**TABLE** 1.d **RECEIPT AND EXPENDITURE BUDGET OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2011**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A c e h	7 089 659 677	1 282 287 393	8 371 947 070	8 077 918 143	294 028 927	8 371 947 070
2.	Sumatera Utara	4 480 781 886	387 997 282	4 868 779 168	4 677 861 462	190 917 706	4 868 779 168
3.	Sumatera Barat	1 986 576 068	211 585 495	2 198 161 563	2 123 681 662	74 479 901	2 198 161 563
4.	R i a u	4 275 900 506	262 357 225	4 538 257 731	4 468 257 731	70 000 000	4 538 257 731
5.	J a m b i	1 399 121 514	100 000 000	1 499 121 514	1 498 751 514	370 000	1 499 121 514
6.	Sumatera Selatan	3 435 484 000	151 342 181	3 586 826 181	3 565 887 000	20 939 181	3 586 826 181
7.	Bengkulu	1 145 967 155	22 558 319	1 168 525 474	1 155 766 504	12 758 970	1 168 525 474
8.	Lampung	2 162 168 622	25 000 000	2 187 168 622	2 181 168 622	6 000 000	2 187 168 622
9.	Bangka Belitung	967 056 492	100 000 000	1 067 056 492	1 067 056 492	0	1 067 056 492
10.	Kepulauan Riau	1 742 026 201	242 173 799	1 984 200 000	1 978 760 000	5 440 000	1 984 200 000
11.	DKI Jakarta	26 079 200 675	2 428 534 745	28 507 735 420	27 875 807 120	631 928 300	28 507 735 420
12.	Jawa Barat	8 424 709 889	1 500 000 000	9 924 709 889	9 887 011 089	37 698 800	9 924 709 889
13.	Jawa Tengah	5 872 245 147	379 904 851	6 252 149 998	6 062 149 998	190 000 000	6 252 149 998
14.	D I Yogyakarta	1 419 475 100	203 425 611	1 622 900 711	1 590 785 711	32 115 000	1 622 900 711
15.	Jawa Timur	9 907 001 027	857 885 361	10 764 886 388	10 626 361 388	138 525 000	10 764 886 388
16.	Banten	2 924 695 191	572 000 000	3 496 695 191	3 485 295 191	11 400 000	3 496 695 191
17.	B a l i	2 143 518 232	340 378 604	2 483 896 836	2 483 896 836	0	2 483 896 836
18.	Nusa Tenggara Barat	1 599 820 063	122 273 107	1 722 093 170	1 657 093 170	65 000 000	1 722 093 170
19.	Nusa Tenggara Timur	1 203 186 300	187 460 125	1 390 646 425	1 308 163 425	82 483 000	1 390 646 425
20.	Kalimantan Barat	1 738 631 913	150 000 000	1 888 631 913	1 853 631 913	35 000 000	1 888 631 913
21.	Kalimantan Tengah	1 705 516 480	91 562 978	1 797 079 458	1 718 016 480	79 062 978	1 797 079 458
22.	Kalimantan Selatan	2 451 950 556	225 000 000	2 676 950 556	2 579 950 556	97 000 000	2 676 950 556
23.	Kalimantan Timur	6 449 634 950	958 000 000	7 407 634 950	7 257 634 950	150 000 000	7 407 634 950
24.	Sulawesi Utara	1 259 701 585	40 206 911	1 299 908 496	1 297 908 496	2 000 000	1 299 908 496
25.	Sulawesi Tengah	1 168 203 130	71 053 804	1 239 256 934	1 232 556 934	6 700 000	1 239 256 934
26.	Sulawesi Selatan	2 872 469 769	111 507 769	2 983 977 538	2 972 277 538	11 700 000	2 983 977 538
27.	Sulawesi Tenggara	1 220 580 518	311 279 052	1 531 859 570	1 405 829 978	126 029 592	1 531 859 570
28.	Gorontalo	636 640 041	59 411 446	696 051 487	671 051 487	25 000 000	696 051 487
29.	Sulawesi Barat	691 786 712	6 000 000	697 786 712	707 810 377	- 10 023 665	697 786 712
30.	M a l u k u	1 103 638 574	25 810 070	1 129 448 644	1 124 498 644	4 950 000	1 129 448 644
31.	Maluku Utara	724 623 611	18 932 778	743 556 389	730 840 000	12 716 389	743 556 389
32.	Papua Barat	3 385 707 355	156 500 000	3 542 207 355	3 517 181 935	25 025 420	3 542 207 355
33.	P a p u a	5 369 147 179	0	5 369 147 179	5 184 147 179	185 000 000	5 369 147 179
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>119 036 826 118</b>	<b>11 602 428 906</b>	<b>130 639 255 024</b>	<b>128 025 009 525</b>	<b>2 614 245 499</b>	<b>130 639 255 024</b>

TABEL  

---

TABLE 2.

<http://www.bps.go.id>





**TABEL 2** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>96 698 251 715</b>	<b>98 900 034 461</b>	<b>116 802 488 665</b>	<b>119 036 826 118</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	44 486 733 562	45 406 418 865	56 726 589 730	59 547 376 401
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	38 042 637 125	37 668 301 884	47 300 841 241	50 201 809 287
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	1 894 314 643	1 571 581 697	1 454 694 720	1 235 989 077
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 300 646 754	1 608 096 150	1 933 195 176	2 244 162 453
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	3 249 135 040	4 558 439 134	6 037 858 593	5 865 415 584
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	42 992 798 385	42 598 264 441	47 519 927 639	46 774 214 602
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	14 824 628 954	15 410 020 005	17 556 536 325	15 355 654 258
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 510 681 776	7 177 595 470	9 896 470 197	8 329 362 038
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	17 951 467 919	18 650 182 966	19 247 315 618	21 894 897 913
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	706 019 736	1 360 466 000	819 605 499	1 194 300 393
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9 218 719 768	10 895 351 155	12 555 971 296	12 715 235 115
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>16 638 848 508</b>	<b>22 992 773 028</b>	<b>16 670 537 821</b>	<b>11 602 428 906</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>113 337 100 223</b>	<b>121 892 807 489</b>	<b>133 473 026 486</b>	<b>130 639 255 024</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 2.1 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
 (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE** 2.1 **ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY RECEIPT ITEMS**  
 (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6 911 764 845</b>	<b>6 042 467 779</b>	<b>6 967 815 083</b>	<b>7 089 659 677</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	716 290 965	735 205 789	796 949 424	797 284 999
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	464 317 355	462 151 773	521 326 413	622 705 834
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	12 002 090	12 040 363	7 493 489	13 264 165
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	66 796 142	75 104 468	98 845 197	102 000 000
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	173 175 378	185 909 185	169 284 325	59 315 000
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	2 605 330 983	1 570 603 947	984 662 488	1 065 890 270
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	272 366 381	175 323 122	201 970 863	84 531 696
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 765 016 546	837 405 601	118 201 135	214 101 102
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	557 327 156	509 686 224	621 074 916	716 646 172
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	10 620 900	48 189 000	43 415 574	50 611 300
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3 590 142 897	3 736 658 043	5 186 203 171	5 226 484 408
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3 141 732 122</b>	<b>4 015 380 289</b>	<b>1 842 988 678</b>	<b>1 282 287 393</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>10 053 496 967</b>	<b>10 057 848 068</b>	<b>8 810 803 761</b>	<b>8 371 947 070</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE 2.2**

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>3 225 853 317</b>	<b>3 212 558 700</b>	<b>3 885 636 140</b>	<b>4 480 781 886</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 181 311 593	2 016 073 324	2 554 780 317	3 181 899 532
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 002 004 605	1 834 682 281	2 271 474 934	2 889 740 173
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	29 409 174	29 456 736	35 813 385	21 105 318
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	89 673 273	90 518 048	166 320 144	201 173 204
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	60 224 541	61 416 259	81 171 854	69 880 837
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 039 050 126	1 167 565 492	1 247 727 249	1 271 126 608
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	306 252 063	354 949 737	403 523 966	338 977 742
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 887 241	5 257 935	2 317 944	8 454 328
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	727 910 822	761 054 820	812 747 639	894 556 838
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	46 303 000	29 137 700	29 137 700
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	5 491 598	28 919 884	83 128 574	27 755 746
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>394 258 830</b>	<b>610 590 952</b>	<b>346 533 462</b>	<b>387 997 282</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 620 112 147</b>	<b>3 823 149 652</b>	<b>4 232 169 602</b>	<b>4 868 779 168</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.3

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 723 767 565</b>	<b>2 026 241 165</b>	<b>1 920 971 383</b>	<b>1 986 576 068</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	790 087 768	739 747 093	1 006 820 947	1 086 756 029
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	670 371 641	619 270 403	768 724 373	911 800 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	50 673 617	51 931 638	28 264 854	30 576 475
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	36 480 958	39 582 354	46 814 067	62 321 907
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	32 561 552	28 962 698	163 017 653	82 057 647
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	744 202 076	789 839 834	785 574 959	894 605 039
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	85 861 993	86 636 422	103 327 542	87 581 554
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 981 379	7 081 400	5 428 657	1 609 290
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	631 791 704	648 943 012	662 403 385	764 680 895
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	24 567 000	47 179 000	14 415 375	40 733 300
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	189 477 721	496 654 238	128 575 477	5 215 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>258 039 339</b>	<b>314 029 282</b>	<b>673 887 321</b>	<b>211 585 495</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 981 806 904</b>	<b>2 340 270 447</b>	<b>2 594 858 704</b>	<b>2 198 161 563</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.4**  
**TABLE 2.4**  
**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**(ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY RECEIPT ITEMS**  
**(thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4 164 943 199</b>	<b>3 231 912 094</b>	<b>4 346 845 188</b>	<b>4 275 900 506</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	1 477 579 373	1 352 412 744	1 339 265 321	1 502 360 879
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	1 274 416 993	1 072 192 524	1 100 000 000	1 205 296 557
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	28 016 663	36 428 217	6 897 102	7 296 102
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67 025 056	101 704 377	108 478 460	131 478 460
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	108 120 661	142 087 626	123 889 759	158 289 760
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	2 687 363 826	1 879 148 800	2 986 535 692	2 683 189 627
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	395 716 641	407 314 202	555 978 232	461 362 063
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 093 271 986	1 299 983 640	2 349 319 803	1 747 807 941
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	198 375 199	171 850 958	58 869 157	380 051 123
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	0	0	22 368 500	93 968 500
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	350 550	21 044 175	90 350 000
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>466 019 841</b>	<b>871 076 872</b>	<b>114 587 470</b>	<b>262 357 225</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 630 963 040</b>	<b>4 102 988 966</b>	<b>4 461 432 658</b>	<b>4 538 257 731</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.5** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.5** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 436 381 400</b>	<b>1 353 900 464</b>	<b>1 640 185 858</b>	<b>1 399 121 514</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	626 110 159	526 442 077	686 629 362	571 301 572
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	527 008 670	438 533 680	602 355 303	530 096 525
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	26 952 822	36 852 013	43 609 629	5 780 512
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 303 508	9 551 179	12 443 520	10 881 827
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	65 845 159	41 505 205	28 220 910	24 542 708
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	745 860 901	802 060 280	932 205 660	827 819 942
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	130 385 477	133 568 381	157 838 823	138 445 615
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	122 217 742	159 865 020	265 593 366	175 569 307
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	468 803 682	473 505 879	488 743 471	489 069 420
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	24 454 000	35 121 000	20 030 000	24 735 600
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	64 410 340	25 398 107	21 350 836	0
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>359 487 858</b>	<b>386 301 605</b>	<b>201 204 877</b>	<b>100 000 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 795 869 258</b>	<b>1 740 202 069</b>	<b>1 841 390 735</b>	<b>1 499 121 514</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE 2.6**

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>2 574 429 820</b>	<b>2 397 685 724</b>	<b>3 224 159 595</b>	<b>3 435 484 000</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 139 863 990	1 054 332 693	1 371 083 868	1 563 704 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 026 923 856	895 326 986	1 226 712 548	1 385 851 745
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	13 507 720	14 770 365	17 747 278	18 950 050
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	42 441 999	56 809 947	61 183 357	73 136 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	56 990 415	87 425 395	65 440 685	85 766 205
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 424 573 687	1 333 161 326	1 823 059 237	1 859 991 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	294 438 302	323 125 392	431 004 842	468 221 682
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	584 359 252	502 680 051	862 163 718	847 399 318
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	545 776 133	507 355 883	512 083 577	512 083 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	17 807 100	32 287 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	9 992 143	10 191 705	30 016 490	11 789 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>101 043 442</b>	<b>288 684 451</b>	<b>315 250 644</b>	<b>151 342 181</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 675 473 262</b>	<b>2 686 370 175</b>	<b>3 539 410 239</b>	<b>3 586 826 181</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.7**  
**TABLE 2.7**  
**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**(ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY RECEIPT ITEMS**  
**(thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 082 518 266</b>	<b>914 357 986</b>	<b>1 000 860 633</b>	<b>1 145 967 155</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	289 078 260	287 781 580	351 091 488	421 521 180
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	214 208 995	203 676 212	259 804 030	293 672 569
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	42 495 507	49 231 277	59 610 610	12 305 420
	<i>Repayments</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 443 690	12 286 352	10 895 322	12 101 760
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	24 930 068	22 587 739	20 781 526	103 441 431
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	529 784 756	589 497 876	598 799 426	694 595 975
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	37 604 403	46 526 570	52 026 355	48 107 516
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 088 742	2 354 812	2 747 881	2 490 823
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	482 472 811	487 339 494	523 041 290	607 388 036
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	7 618 800	53 277 000	20 983 900	36 609 600
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	263 655 250	37 078 530	50 969 719	29 850 000
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>445 850 386</b>	<b>218 702 463</b>	<b>10 570 146</b>	<b>22 558 319</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 528 368 652</b>	<b>1 133 060 449</b>	<b>1 011 430 779</b>	<b>1 168 525 474</b>

\*) Data APBD



**TABEL 2.8**  
**TABLE 2.8**  
**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**(ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY RECEIPT ITEMS**  
**(thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 723 036 643</b>	<b>1 742 386 840</b>	<b>2 091 684 131</b>	<b>2 162 168 622</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	891 781 560	860 357 826	1 118 340 908	1 085 424 022
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	774 613 920	725 464 224	951 316 481	885 967 000
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	71 175 337	75 266 014	7 159 463	6 746 202
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11 205 126	12 137 116	12 869 366	18 244 940
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	34 787 177	47 490 472	146 995 598	174 465 880
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	817 632 624	829 026 291	908 420 168	987 944 600
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	91 339 873	98 328 704	130 179 866	147 058 396
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	133 030 821	62 175 914	107 290 368	105 189 374
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	570 533 930	628 505 673	643 376 134	708 123 030
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	22 728 000	40 016 000	27 573 800	27 573 800
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13 622 459	53 002 723	64 923 055	88 800 000
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>180 319 738</b>	<b>183 672 386</b>	<b>79 029 066</b>	<b>25 000 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 903 356 381</b>	<b>1 926 059 226</b>	<b>2 170 713 197</b>	<b>2 187 168 622</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.9

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>840 122 439</b>	<b>804 845 143</b>	<b>848 025 113</b>	<b>967 056 492</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	294 184 568	246 799 845	328 122 025	316 749 538
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	260 085 863	215 623 985	296 214 789	288 235 083
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	3 000 947	4 043 048	2 628 024	1 801 603
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	1 023 524	1 771 547	3 077 328	1 800 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	30 074 234	25 361 265	26 201 884	24 912 852
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	545 937 871	557 876 173	519 288 576	600 306 954
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	41 571 829	44 007 941	52 057 507	41 655 386
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	93 494 502	60 310 388	48 516 961	53 220 453
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	391 045 440	407 994 844	410 642 308	481 589 915
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	19 826 100	45 563 000	8 071 800	23 841 200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	169 125	614 512	50 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>254 692 423</b>	<b>315 545 870</b>	<b>264 129 736</b>	<b>100 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 094 814 862</b>	<b>1 120 391 013</b>	<b>1 112 154 849</b>	<b>1 067 056 492</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.10** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.10** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 356 574 432</b>	<b>1 459 000 000</b>	<b>1 853 589 773</b>	<b>1 742 026 201</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	406 282 784	381 946 943	522 006 644	450 214 928
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	391 240 524	364 442 649	493 565 569	427 296 577
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	1 903 566	3 560 000	1 475 997	1 677 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	680 000	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 138 694	13 264 294	26 965 078	21 240 851
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	950 291 648	1 077 053 057	1 310 792 978	1 270 951 672
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	174 674 004	193 843 308	234 376 006	230 979 970
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	480 931 786	459 146 269	761 696 229	696 485 711
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	288 884 858	403 132 480	310 161 843	338 927 091
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	5 801 000	20 931 000	4 558 900	4 558 900
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	0	20 790 151	20 859 601
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>184 315 626</b>	<b>391 953 213</b>	<b>242 173 799</b>	<b>242 173 799</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 540 890 058</b>	<b>1 850 953 213</b>	<b>2 095 763 572</b>	<b>1 984 200 000</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.11** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.11** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>19 221 757 881</b>	<b>19 251 893 888</b>	<b>23 025 986 993</b>	<b>26 079 200 675</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	10 455 565 541	10 601 057 958	12 891 992 182	16 022 580 847
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	8 751 273 783	8 560 134 926	10 751 745 151	13 709 000 000
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	395 639 568	416 899 029	439 210 908	425 000 000
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	163 151 310	181 130 584	223 005 616	225 000 000
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	1 145 500 880	1 442 893 419	1 478 030 507	1 663 580 847
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	8 702 813 394	8 650 835 930	9 537 609 058	8 909 900 000
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	8 526 794 673	8 580 181 350	9 398 613 244	8 600 000 000
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	176 018 721	70 654 580	138 995 814	100 000 000
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	0	0	0	209 900 000
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	63 378 946	0	596 385 753	1 146 719 828
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1 364 256 321</b>	<b>4 446 373 058</b>	<b>3 748 512 147</b>	<b>2 428 534 745</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>20 586 014 202</b>	<b>23 698 266 946</b>	<b>26 774 499 140</b>	<b>28 507 735 420</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE 2.12** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY RECEIPT ITEMS**  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7 275 007 134</b>	<b>7 785 889 984</b>	<b>9 742 187 781</b>	<b>8 424 709 889</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	5 275 051 504	5 577 588 779	7 252 242 913	6 316 399 883
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	4 926 338 153	4 979 386 047	6 470 866 063	5 773 676 530
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	35 398 711	36 717 162	32 248 950	43 063 416
	<i>Repayments</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	138 674 865	179 835 133	226 365 880	225 178 842
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	174 639 775	381 650 437	522 762 020	274 481 095
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	1 903 729 826	2 172 729 228	2 427 857 461	2 096 137 569
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	906 558 068	939 646 464	1 113 053 612	789 034 861
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	92 812 843	248 784 940	190 109 609	79 785 000
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	904 358 915	984 297 824	1 086 123 940	1 181 553 108
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	0	0	38 570 300	45 764 600
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	96 225 804	35 571 977	62 087 407	12 172 437
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1 350 314 356</b>	<b>2 457 196 766</b>	<b>1 789 756 684</b>	<b>1 500 000 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 625 321 490</b>	<b>10 243 086 750</b>	<b>11 531 944 465</b>	<b>9 924 709 889</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.13** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.13** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5 203 414 609</b>	<b>5 696 660 052</b>	<b>6 626 316 989</b>	<b>5 872 245 147</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	3 698 843 478	4 000 735 711	4 785 133 227	4 182 627 057
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	3 068 130 112	3 236 777 063	3 893 699 996	3 413 750 000
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	321 963 375	127 405 511	127 651 269	53 758 076
	<i>Repayments</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	131 312 950	153 848 190	195 631 744	193 576 967
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	177 437 041	482 704 947	568 150 218	521 542 014
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	1 504 184 018	1 691 853 080	1 811 657 949	1 689 618 090
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	443 381 492	547 901 611	604 154 702	482 805 958
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 310 655	9 771 868	10 411 240	8 458 375
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 053 491 871	1 130 742 601	1 168 787 757	1 168 787 757
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	0	3 437 000	28 304 250	29 566 000
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	387 113	4 071 261	29 525 813	0
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>848 298 788</b>	<b>683 817 617</b>	<b>904 356 288</b>	<b>379 904 851</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>6 051 713 397</b>	<b>6 380 477 669</b>	<b>7 530 673 277</b>	<b>6 252 149 998</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.14** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.14** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 258 609 946</b>	<b>1 286 067 485</b>	<b>1 374 205 096</b>	<b>1 419 475 100</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	632 872 312	645 145 551	740 202 076	700 339 192
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	525 185 354	541 192 266	634 710 019	592 498 872
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	29 259 898	34 785 229	34 116 476	37 709 418
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 481 051	20 094 713	26 333 870	30 557 391
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	65 946 009	49 073 343	45 041 711	39 573 511
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	601 802 167	631 011 121	626 677 339	714 542 343
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	70 549 425	73 677 652	87 816 512	74 233 804
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	11 348	3 521	5 480	6 611
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	511 773 394	523 919 948	527 471 247	620 812 328
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	19 468 000	33 410 000	11 384 100	19 489 600
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	23 935 467	9 910 813	7 325 681	4 593 565
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>537 060 364</b>	<b>285 824 679</b>	<b>256 568 355</b>	<b>203 425 611</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 795 670 310</b>	<b>1 571 892 164</b>	<b>1 630 773 451</b>	<b>1 622 900 711</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.15** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.15** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>7 075 105 413</b>	<b>7 827 694 815</b>	<b>9 980 544 750</b>	<b>9 907 001 027</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	5 212 319 316	5 708 030 337	7 478 530 080	7 615 042 879
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	4 481 791 544	4 891 816 303	5 907 320 403	6 120 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	309 323 367	75 950 583	66 237 597	56 350 359
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	195 402 284	227 446 226	243 826 826	315 158 898
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	225 802 121	512 817 225	1 261 145 254	1 123 533 622
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 798 151 003	2 093 556 409	2 445 304 862	2 267 158 148
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	775 290 376	941 891 859	1 165 084 944	854 290 870
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	0	15 185 200	10 302 953	10 334 379
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1 022 860 627	1 118 478 350	1 212 934 765	1 347 501 699
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	18 001 000	56 982 200	55 031 200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	64 635 094	26 108 069	56 709 808	24 800 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>1 723 922 045</b>	<b>2 061 246 529</b>	<b>1 995 753 452</b>	<b>857 885 361</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 799 027 458</b>	<b>9 888 941 344</b>	<b>11 976 298 202</b>	<b>10 764 886 388</b>

\*) Data APBD



**TABEL 2.16** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.16** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 351 380 505</b>	<b>2 436 096 122</b>	<b>3 139 437 626</b>	<b>2 924 695 191</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	1 661 168 634	1 687 721 367	2 321 586 438	2 079 096 635
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	1 601 610 635	1 617 821 795	2 208 083 478	2 001 000 000
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	3 184 527	2 921 743	3 207 707	2 818 000
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21 478 617	29 415 352	37 874 447	37 678 635
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	34 894 855	37 562 477	72 420 806	37 600 000
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	686 651 066	744 966 513	812 654 174	841 416 056
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	324 786 786	351 030 720	416 150 982	335 430 560
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 023 419	635 706	863 573	422 213
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	342 743 861	361 179 087	381 979 019	460 383 683
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	18 097 000	32 121 000	13 660 600	45 179 600
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3 560 805	3 408 242	5 197 014	4 182 500
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>149 104 130</b>	<b>237 720 327</b>	<b>235 495 508</b>	<b>572 000 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 500 484 635</b>	<b>2 673 816 449</b>	<b>3 374 933 134</b>	<b>3 496 695 191</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.17** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.17** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 667 342 648</b>	<b>1 902 227 543</b>	<b>2 237 707 339</b>	<b>2 143 518 232</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	1 057 791 777	1 163 947 552	1 393 730 257	1 249 491 623
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	945 973 962	1 027 714 551	1 221 182 092	1 101 873 289
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	18 948 030	21 111 558	20 940 232	24 766 394
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45 593 209	53 713 430	60 788 386	64 229 348
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	47 276 576	61 408 013	90 819 547	58 622 592
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	576 550 871	636 608 487	649 257 693	706 007 314
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	115 383 052	128 712 266	150 963 833	124 112 775
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0	0	0	0
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	448 187 419	471 788 221	489 942 535	560 673 539
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	12 980 400	36 108 000	8 351 325	21 221 000
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	33 000 000	101 671 504	194 719 389	188 019 295
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>282 503 094</b>	<b>468 108 450</b>	<b>538 452 871</b>	<b>340 378 604</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 949 845 742</b>	<b>2 370 335 993</b>	<b>2 776 160 210</b>	<b>2 483 896 836</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.18** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.18** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 066 716 532</b>	<b>1 173 506 085</b>	<b>1 272 218 059</b>	<b>1 599 820 063</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	430 222 359	471 988 816	515 340 957	709 889 082
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	348 568 544	369 172 469	391 690 342	460 077 066
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	37 635 219	47 581 597	54 900 839	67 556 593
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 161 166	25 192 762	40 937 455	122 951 310
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	26 857 430	30 041 988	27 812 321	59 304 113
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	626 994 173	701 175 944	756 256 439	877 930 981
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	59 770 703	65 768 462	112 925 607	108 410 320
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18 721 992	32 951 518	45 501 002	47 595 664
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	511 286 478	554 431 964	573 065 430	646 671 083
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	37 215 000	48 024 000	24 764 400	75 253 914
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	9 500 000	341 325	620 663	12 000 000
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>71 073 304</b>	<b>63 928 652</b>	<b>73 514 841</b>	<b>122 273 107</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 137 789 836</b>	<b>1 237 434 737</b>	<b>1 345 732 900</b>	<b>1 722 093 170</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE 2.19** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>946 026 752</b>	<b>1 023 505 681</b>	<b>1 088 071 459</b>	<b>1 203 186 300</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	237 286 164	255 674 617	298 154 337	343 231 319
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	150 722 922	164 358 587	195 007 612	220 439 111
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	32 817 661	44 389 652	47 973 591	10 046 902
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 707 326	11 452 770	19 826 431	30 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	41 038 255	35 473 608	35 346 703	82 745 306
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	708 740 588	767 566 614	773 795 618	859 954 981
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	53 762 651	54 842 414	68 647 419	65 965 997
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	57 683	234 197	263 132	239 340
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	616 601 854	652 757 003	674 635 569	752 057 444
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 318 400	59 733 000	30 249 498	41 692 200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	264 450	16 121 504	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>310 377 666</b>	<b>268 175 864</b>	<b>224 112 521</b>	<b>187 460 125</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 256 404 418</b>	<b>1 291 681 545</b>	<b>1 312 183 980</b>	<b>1 390 646 425</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.20** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.20** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 474 197 546</b>	<b>1 577 890 709</b>	<b>1 778 927 314</b>	<b>1 738 631 913</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	586 814 658	579 575 650	777 243 196	733 335 129
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	494 929 572	450 518 927	620 608 802	585 920 549
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	39 085 749	70 156 538	78 579 088	72 825 340
	<i>Repayments</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18 239 410	25 241 502	35 202 158	38 257 586
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	34 559 927	33 658 683	42 853 148	36 331 654
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	865 203 181	970 706 171	920 636 282	1 000 796 784
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	94 135 838	160 261 092	127 979 083	106 303 040
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11 891 129	12 296 934	7 915 306	10 640 356
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	728 080 795	744 834 145	755 123 093	845 483 888
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	31 095 419	53 314 000	29 618 800	38 369 500
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	22 179 707	27 608 888	81 047 836	4 500 000
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>134 331 750</b>	<b>222 153 924</b>	<b>173 009 098</b>	<b>150 000 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 608 529 296</b>	<b>1 800 044 633</b>	<b>1 951 936 412</b>	<b>1 888 631 913</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.21** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.21** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 246 835 944</b>	<b>1 367 412 136</b>	<b>1 555 426 286</b>	<b>1 705 516 480</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	380 665 559	382 020 409	504 217 391	664 905 150
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	318 109 354	300 825 200	416 518 895	467 303 700
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	23 495 499	24 073 562	25 282 312	6 297 600
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 297 018	22 897 144	17 303 860	17 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	26 763 688	34 224 503	45 112 324	173 803 850
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	859 670 385	913 061 727	921 225 167	1 022 611 330
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	108 900 477	113 202 095	129 086 986	124 980 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	40 377 818	45 741 426	51 961 488	49 900 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	670 213 090	694 822 206	707 880 493	795 816 330
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	40 179 000	59 296 000	32 296 200	51 915 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	6 500 000	72 330 000	129 983 728	18 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>205 554 131</b>	<b>145 923 582</b>	<b>57 885 383</b>	<b>91 562 978</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 452 390 075</b>	<b>1 513 335 718</b>	<b>1 613 311 669</b>	<b>1 797 079 458</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.22** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.22** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 875 797 122</b>	<b>2 109 410 863</b>	<b>2 279 776 309</b>	<b>2 451 950 556</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 052 561 036	1 021 456 330	1 286 258 612	1 392 300 836
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	904 946 734	833 641 848	1 088 346 425	1 178 213 100
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	21 362 670	124 902 899	41 660 161	38 359 736
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	19 000 527	23 035 518	8 388 793	35 700 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	107 251 105	39 876 065	147 863 233	140 028 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	790 997 259	1 004 989 665	930 124 574	1 013 864 720
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	114 685 226	116 001 431	142 683 191	131 500 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	173 713 826	361 576 568	309 529 316	374 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	466 559 207	484 059 666	458 074 767	483 364 720
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	36 039 000	43 352 000	19 837 300	25 000 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	32 238 827	82 964 868	63 393 123	45 785 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>269 666 395</b>	<b>549 419 700</b>	<b>492 660 308</b>	<b>225 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 145 463 517</b>	<b>2 658 830 563</b>	<b>2 772 436 617</b>	<b>2 676 950 556</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.23**  
**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>6 127 503 221</b>	<b>5 348 926 268</b>	<b>7 044 556 875</b>	<b>6 449 634 950</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 070 292 604	2 208 309 119	2 714 815 547	2 641 234 430
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 561 637 233	1 539 702 678	2 023 934 390	1 992 500 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	182 804 915	5 621 676	10 787 074	14 344 930
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	73 576 449	121 104 217	137 612 246	130 146 500
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	252 274 007	541 880 548	542 481 837	504 243 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	4 050 186 678	3 122 061 454	4 308 464 375	3 798 310 520
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	548 180 146	576 616 211	653 810 498	592 078 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 375 771 283	2 523 474 916	3 620 846 163	3 116 597 570
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	126 235 249	18 159 327	164 514	51 446 850
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	3 811 000	33 643 200	38 188 100
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	7 023 939	18 555 695	21 276 953	10 090 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>2 361 237 901</b>	<b>2 007 208 728</b>	<b>808 568 904</b>	<b>958 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 488 741 122</b>	<b>7 356 134 996</b>	<b>7 853 125 779</b>	<b>7 407 634 950</b>

\*) Data APBD



**TABEL 2.24** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.24** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>965 147 321</b>	<b>1 023 349 288</b>	<b>1 158 671 349</b>	<b>1 259 701 585</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	322 580 793	331 083 668	418 737 661	451 754 886
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	288 295 726	289 214 884	373 765 054	409 963 465
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	6 188 412	7 566 535	11 933 613	6 591 421
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 902 773	16 369 246	13 553 666	20 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	15 193 882	17 933 003	19 485 328	15 200 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	613 566 528	674 267 802	650 530 096	703 999 207
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	51 658 171	61 298 807	73 405 246	54 034 720
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	913 190	1 455 064	904 637	965 280
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	532 916 167	558 634 931	558 781 013	619 711 007
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	28 079 000	52 879 000	17 439 200	29 288 200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	29 000 000	17 997 818	89 403 592	103 947 492
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>385 989 059</b>	<b>399 104 168</b>	<b>347 025 574</b>	<b>40 206 911</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 351 136 380</b>	<b>1 422 453 456</b>	<b>1 505 696 923</b>	<b>1 299 908 496</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.25**  
**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 042 484 623</b>	<b>1 052 332 635</b>	<b>1 177 609 898</b>	<b>1 168 203 130</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	278 853 995	275 191 234	411 797 140	325 623 116
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	245 120 991	223 061 767	344 354 728	247 678 136
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	19 892 824	20 731 195	29 650 214	39 395 960
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	4 093 853	7 525 806	11 384 015	14 299 745
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	9 746 327	23 872 466	26 408 183	24 249 275
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	701 889 829	756 439 213	759 172 265	839 180 014
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	52 187 114	65 468 194	69 360 924	54 988 024
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 379 754	1 516 833	1 883 270	2 254 842
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	606 544 317	629 397 186	659 331 271	743 757 969
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	38 778 644	60 057 000	28 596 800	38 179 179
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	61 740 799	20 702 188	6 640 493	3 400 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>108 000 559</b>	<b>189 511 577</b>	<b>177 052 220</b>	<b>71 053 804</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 150 485 182</b>	<b>1 241 844 212</b>	<b>1 354 662 118</b>	<b>1 239 256 934</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.26** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.26** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2 133 624 783</b>	<b>2 175 750 141</b>	<b>2 564 075 935</b>	<b>2 872 469 769</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	1 238 690 402	1 242 766 168	1 545 589 709	1 782 147 365
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	1 068 165 045	1 044 931 821	1 334 804 021	1 549 178 764
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	72 972 983	100 604 093	108 560 877	111 167 662
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	54 831 924	59 350 545	51 551 621	63 577 263
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	42 720 450	37 879 709	50 673 190	58 223 676
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	894 934 381	914 502 834	959 942 494	1 090 322 404
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	177 167 583	197 154 690	217 385 913	216 491 821
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	25 918 855	9 076 750	7 003 880	15 120 114
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	656 710 943	663 422 394	706 276 399	816 757 969
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	35 137 000	44 849 000	29 276 302	41 952 500
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	18 481 139	58 543 732	0
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>208 669 551</b>	<b>183 706 090</b>	<b>230 448 199</b>	<b>111 507 769</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 342 294 334</b>	<b>2 359 456 231</b>	<b>2 794 524 134</b>	<b>2 983 977 538</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.27** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.27** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>957 848 767</b>	<b>1 030 720 131</b>	<b>1 055 173 630</b>	<b>1 220 580 518</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	296 603 457	223 128 481	339 360 819	421 500 258
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	150 462 599	171 402 251	202 929 981	205 977 997
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	19 790 109	40 252 603	51 035 765	41 102 722
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11 732 028	4 871 004	14 103 892	14 150 010
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	114 618 721	6 602 623	71 291 181	160 269 529
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	657 211 240	705 062 822	691 637 811	799 080 260
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	50 637 799	53 254 936	64 736 445	60 535 103
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10 272 059	5 645 752	7 106 547	3 904 000
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	566 435 382	589 844 134	595 762 419	700 836 557
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	29 866 000	56 318 000	24 032 400	33 804 600
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4 034 070	102 528 828	24 175 000	0
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61 603 700</b>	<b>124 465 203</b>	<b>106 197 607</b>	<b>311 279 052</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 019 452 467</b>	<b>1 155 185 334</b>	<b>1 161 371 237</b>	<b>1 531 859 570</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.28** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.28** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>536 574 283</b>	<b>561 186 326</b>	<b>593 415 093</b>	<b>636 640 041</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	94 511 961	102 626 018	133 147 652	122 766 741
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	82 572 431	86 443 156	120 748 491	110 427 279
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	0	0	0	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	163 912	0	0	550 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	11 775 618	16 182 862	12 399 161	11 789 462
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	413 118 212	458 560 308	438 419 416	513 873 300
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	18 679 714	18 683 429	26 766 048	24 678 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	426 502	205 623	167 648	20 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	368 637 996	388 325 256	400 750 820	461 118 100
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	25 374 000	51 346 000	10 734 900	28 057 200
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	28 944 110	0	21 848 025	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>128 731 650</b>	<b>123 276 331</b>	<b>65 070 534</b>	<b>59 411 446</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>665 305 933</b>	<b>684 462 657</b>	<b>658 485 627</b>	<b>696 051 487</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.29** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.29** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>510 759 425</b>	<b>554 240 280</b>	<b>610 378 110</b>	<b>691 786 712</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	61 855 624	64 444 722	90 207 582	110 075 879
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	54 259 243	55 399 980	78 352 878	82 257 159
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	1 346 143	1 407 597	1 908 405	3 019 920
	<i>Repayments</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	2 522	0
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	6 250 238	7 637 145	9 943 777	24 798 800
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	432 964 939	482 372 729	456 339 988	511 710 833
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	20 304 273	24 770 036	32 835 423	33 851 333
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	247 994	489 187	222 988	420 000
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	366 674 672	391 060 506	405 749 577	441 578 800
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	45 738 000	66 053 000	17 532 000	35 860 700
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	15 938 862	7 422 829	63 830 540	70 000 000
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>70 248 928</b>	<b>59 884 225</b>	<b>23 221 030</b>	<b>6 000 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>581 008 353</b>	<b>614 124 505</b>	<b>633 599 140</b>	<b>697 786 712</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.30** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.30** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>786 335 010</b>	<b>1 008 730 045</b>	<b>952 660 802</b>	<b>1 103 638 574</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	120 041 354	146 189 045	169 568 947	222 001 924
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	87 892 220	94 307 563	116 396 548	167 294 010
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	19 480 368	21 641 650	25 304 142	25 535 114
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 034 628	16 500 000	17 061 249	18 950 000
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	11 634 138	13 739 832	10 807 008	10 222 800
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	648 432 736	704 206 719	715 451 154	817 136 650
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	56 952 774	55 303 238	72 048 913	65 634 311
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 292 760	2 472 684	3 058 590	2 850 689
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	556 236 402	578 163 797	607 572 176	703 993 950
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	32 950 800	68 267 000	32 771 475	44 657 700
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17 860 920	158 334 281	67 640 701	64 500 000
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>62 415 818</b>	<b>64 679 783</b>	<b>58 385 591</b>	<b>25 810 070</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>848 750 828</b>	<b>1 073 409 828</b>	<b>1 011 046 393</b>	<b>1 129 448 644</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.31** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.31** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>676 545 728</b>	<b>685 771 448</b>	<b>695 828 538</b>	<b>724 623 611</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	75 338 211	73 292 408	77 842 743	80 678 449
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	55 753 310	51 029 373	61 999 098	61 568 197
1.2.	Retribusi Daerah <i>Rebtributions</i>	4 855 112	12 450 354	10 542 401	14 786 167
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	76 190	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	14 729 789	9 812 681	5 225 054	4 324 085
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	571 207 517	612 479 040	604 964 763	641 623 611
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	50 520 990	49 775 494	69 097 630	36 082 919
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	32 723 068	20 533 886	30 000 369	13 917 081
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	451 481 459	458 511 660	479 480 664	540 389 811
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	36 482 000	83 658 000	26 386 100	51 233 800
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	30 000 000	0	13 021 032	2 321 551
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>26 220 676</b>	<b>81 106 646</b>	<b>2 872 955</b>	<b>18 932 778</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>702 766 404</b>	<b>766 878 094</b>	<b>698 701 493</b>	<b>743 556 389</b>

\*) Data APBD



**TABEL 2.32** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.32** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 502 766 461</b>	<b>2 822 594 303</b>	<b>3 407 802 988</b>	<b>3 385 707 355</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	76 490 048	73 617 899	125 774 327	98 962 042
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	66 519 244	65 295 146	99 847 508	80 050 000
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	21 668	254 577	1 091 318	1 490 000
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	1 096 715	4 386 860
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	9 949 136	8 068 176	23 738 786	13 035 182
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	856 776 413	1 030 362 654	1 462 347 938	1 332 510 409
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	175 669 065	167 370 968	184 845 998	173 501 140
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	52 619 814	198 655 957	649 958 976	418 025 459
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	578 084 261	595 755 729	605 786 464	700 444 910
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	50 403 273	68 580 000	21 756 500	40 538 900
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	569 500 000	1 718 613 750	1 819 680 723	1 954 234 904
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>193 508 717</b>	<b>49 003 746</b>	<b>129 160 000</b>	<b>156 500 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 696 275 178</b>	<b>2 871 598 049</b>	<b>3 536 962 988</b>	<b>3 542 207 355</b>

\*) Data APBD

**TABEL 2.33** REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 2.33** ACTUAL RECEIPT OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY RECEIPT ITEMS  
(thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Penerimaan	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5 757 078 135</b>	<b>6 012 822 338</b>	<b>5 661 736 549</b>	<b>5 369 147 179</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>				
1.	Pendapatan Asli Daerah	357 741 755	369 727 112	380 025 633	304 175 000
	<i>Original Local Government Revenue</i>				
1.1.	Pajak Daerah	259 185 992	242 788 566	252 434 826	230 500 000
	<i>Local Taxes</i>				
1.2.	Retribusi Daerah	19 710 392	20 576 683	21 171 950	20 500 000
	<i>Rebtributions</i>				
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26 418 178	28 926 620	30 340 833	29 175 000
	<i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>				
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	52 427 193	77 435 243	76 078 024	24 000 000
	<i>Other Original Local Gov. Revenue</i>				
2.	Dana Perimbangan	1 436 993 483	1 563 054 901	1 762 534 290	1 570 107 391
	<i>Balanced Budget</i>				
2.1.	Bagi Hasil Pajak	198 461 592	203 582 807	252 799 170	199 789 082
	<i>Tax Share</i>				
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	201 897 066	219 971 330	286 182 154	221 577 418
	<i>Non Tax Share/Natural Resources</i>				
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 002 431 825	1 058 227 764	1 148 497 966	1 148 740 891
	<i>General Allocation Funds</i>				
2.4.	Dana Alokasi Khusus	34 203 000	81 273 000	75 055 000	0
	<i>Special Allocation Funds</i>				
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3 962 342 897	4 080 040 325	3 519 176 626	3 494 864 788
	<i>Other Legal Revenue</i>				
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>225 000 000</b>	<b>142 102 552</b>	<b>0</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>5 757 078 135</b>	<b>6 237 822 338</b>	<b>5 803 839 101</b>	<b>5 369 147 179</b>

\*) Data APBD

TABEL  

---

TABLE 3.

<http://www.bps.go.id>



**TABEL**  
**TABLE** 3.A

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**(ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA**  
**(thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	6 911 764 845	6 042 467 779	6 967 815 083	7 089 659 677
2.	Sumatera Utara	3 225 853 317	3 212 558 700	3 885 636 140	4 480 781 886
3.	Sumatera Barat	1 723 767 565	2 026 241 165	1 920 971 383	1 986 576 068
4.	R i a u	4 164 943 199	3 231 912 094	4 346 845 188	4 275 900 506
5.	J a m b i	1 436 381 400	1 353 900 464	1 640 185 858	1 399 121 514
6.	Sumatera Selatan	2 574 429 820	2 397 685 724	3 224 159 595	3 435 484 000
7.	Bengkulu	1 082 518 266	914 357 986	1 000 860 633	1 145 967 155
8.	Lampung	1 723 036 643	1 742 386 840	2 091 684 131	2 162 168 622
9.	Bangka Belitung	840 122 439	804 845 143	848 025 113	967 056 492
10.	Kepulauan Riau	1 356 574 432	1 459 000 000	1 853 589 773	1 742 026 201
11.	DKI Jakarta	19 221 757 881	19 251 893 888	23 025 986 993	26 079 200 675
12.	Jawa Barat	7 275 007 134	7 785 889 984	9 742 187 781	8 424 709 889
13.	Jawa Tengah	5 203 414 609	5 696 660 052	6 626 316 989	5 872 245 147
14.	D I Yogyakarta	1 258 609 946	1 286 067 485	1 374 205 096	1 419 475 100
15.	Jawa Timur	7 075 105 413	7 827 694 815	9 980 544 750	9 907 001 027
16.	Banten	2 351 380 505	2 436 096 122	3 139 437 626	2 924 695 191
17.	B a l i	1 667 342 648	1 902 227 543	2 237 707 339	2 143 518 232
18.	Nusa Tenggara Barat	1 066 716 532	1 173 506 085	1 272 218 059	1 599 820 063
19.	Nusa Tenggara Timur	946 026 752	1 023 505 681	1 088 071 459	1 203 186 300
20.	Kalimantan Barat	1 474 197 546	1 577 890 709	1 778 927 314	1 738 631 913
21.	Kalimantan Tengah	1 246 835 944	1 367 412 136	1 555 426 286	1 705 516 480
22.	Kalimantan Selatan	1 875 797 122	2 109 410 863	2 279 776 309	2 451 950 556
23.	Kalimantan Timur	6 127 503 221	5 348 926 268	7 044 556 875	6 449 634 950
24.	Sulawesi Utara	965 147 321	1 023 349 288	1 158 671 349	1 259 701 585
25.	Sulawesi Tengah	1 042 484 623	1 052 332 635	1 177 609 898	1 168 203 130
26.	Sulawesi Selatan	2 133 624 783	2 175 750 141	2 564 075 935	2 872 469 769
27.	Sulawesi Tenggara	957 848 767	1 030 720 131	1 055 173 630	1 220 580 518
28.	Gorontalo	536 574 283	561 186 326	593 415 093	636 640 041
29.	Sulawesi Barat	510 759 425	554 240 280	610 378 110	691 786 712
30.	M a l u k u	786 335 010	1 008 730 045	952 660 802	1 103 638 574
31.	Maluku Utara	676 545 728	685 771 448	695 828 538	724 623 611
32.	Papua Barat	1 502 766 461	2 822 594 303	3 407 802 988	3 385 707 355
33.	P a p u a	5 757 078 135	6 012 822 338	5 661 736 549	5 369 147 179
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>96 698 251 715</b>	<b>98 900 034 461</b>	<b>116 802 488 665</b>	<b>119 036 826 118</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.1

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),  
2008-2011**  
**ACTUAL ORIGINAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA  
(thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	716 290 965	735 205 789	796 949 424	797 284 999
2.	Sumatera Utara	2 181 311 593	2 016 073 324	2 554 780 317	3 181 899 532
3.	Sumatera Barat	790 087 768	739 747 093	1 006 820 947	1 086 756 029
4.	R i a u	1 477 579 373	1 352 412 744	1 339 265 321	1 502 360 879
5.	J a m b i	626 110 159	526 442 077	686 629 362	571 301 572
6.	Sumatera Selatan	1 139 863 990	1 054 332 693	1 371 083 868	1 563 704 000
7.	Bengkulu	289 078 260	287 781 580	351 091 488	421 521 180
8.	Lampung	891 781 560	860 357 826	1 118 340 908	1 085 424 022
9.	Bangka Belitung	294 184 568	246 799 845	328 122 025	316 749 538
10.	Kepulauan Riau	406 282 784	381 946 943	522 006 644	450 214 928
11.	DKI Jakarta	10 455 565 541	10 601 057 958	12 891 992 182	16 022 580 847
12.	Jawa Barat	5 275 051 504	5 577 588 779	7 252 242 913	6 316 399 883
13.	Jawa Tengah	3 698 843 478	4 000 735 711	4 785 133 227	4 182 627 057
14.	D I Yogyakarta	632 872 312	645 145 551	740 202 076	700 339 192
15.	Jawa Timur	5 212 319 316	5 708 030 337	7 478 530 080	7 615 042 879
16.	Banten	1 661 168 634	1 687 721 367	2 321 586 438	2 079 096 635
17.	B a l i	1 057 791 777	1 163 947 552	1 393 730 257	1 249 491 623
18.	Nusa Tenggara Barat	430 222 359	471 988 816	515 340 957	709 889 082
19.	Nusa Tenggara Timur	237 286 164	255 674 617	298 154 337	343 231 319
20.	Kalimantan Barat	586 814 658	579 575 650	777 243 196	733 335 129
21.	Kalimantan Tengah	380 665 559	382 020 409	504 217 391	664 905 150
22.	Kalimantan Selatan	1 052 561 036	1 021 456 330	1 286 258 612	1 392 300 836
23.	Kalimantan Timur	2 070 292 604	2 208 309 119	2 714 815 547	2 641 234 430
24.	Sulawesi Utara	322 580 793	331 083 668	418 737 661	451 754 886
25.	Sulawesi Tengah	278 853 995	275 191 234	411 797 140	325 623 116
26.	Sulawesi Selatan	1 238 690 402	1 242 766 168	1 545 589 709	1 782 147 365
27.	Sulawesi Tenggara	296 603 457	223 128 481	339 360 819	421 500 258
28.	Gorontalo	94 511 961	102 626 018	133 147 652	122 766 741
29.	Sulawesi Barat	61 855 624	64 444 722	90 207 582	110 075 879
30.	M a l u k u	120 041 354	146 189 045	169 568 947	222 001 924
31.	Maluku Utara	75 338 211	73 292 408	77 842 743	80 678 449
32.	Papua Barat	76 490 048	73 617 899	125 774 327	98 962 042
33.	P a p u a	357 741 755	369 727 112	380 025 633	304 175 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>44 486 733 562</b>	<b>45 406 418 865</b>	<b>56 726 589 730</b>	<b>59 547 376 401</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.1.1

**REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),  
2008-2011**  
**ACTUAL LOCAL INCOME TAXES OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT  
INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	464 317 355	462 151 773	521 326 413	622 705 834
2.	Sumatera Utara	2 002 004 605	1 834 682 281	2 271 474 934	2 889 740 173
3.	Sumatera Barat	670 371 641	619 270 403	768 724 373	911 800 000
4.	R i a u	1 274 416 993	1 072 192 524	1 100 000 000	1 205 296 557
5.	J a m b i	527 008 670	438 533 680	602 355 303	530 096 525
6.	Sumatera Selatan	1 026 923 856	895 326 986	1 226 712 548	1 385 851 745
7.	Bengkulu	214 208 995	203 676 212	259 804 030	293 672 569
8.	Lampung	774 613 920	725 464 224	951 316 481	885 967 000
9.	Bangka Belitung	260 085 863	215 623 985	296 214 789	288 235 083
10.	Kepulauan Riau	391 240 524	364 442 649	493 565 569	427 296 577
11.	DKI Jakarta	8 751 273 783	8 560 134 926	10 751 745 151	13 709 000 000
12.	Jawa Barat	4 926 338 153	4 979 386 047	6 470 866 063	5 773 676 530
13.	Jawa Tengah	3 068 130 112	3 236 777 063	3 893 699 996	3 413 750 000
14.	D I Yogyakarta	525 185 354	541 192 266	634 710 019	592 498 872
15.	Jawa Timur	4 481 791 544	4 891 816 303	5 907 320 403	6 120 000 000
16.	Banten	1 601 610 635	1 617 821 795	2 208 083 478	2 001 000 000
17.	B a l i	945 973 962	1 027 714 551	1 221 182 092	1 101 873 289
18.	Nusa Tenggara Barat	348 568 544	369 172 469	391 690 342	460 077 066
19.	Nusa Tenggara Timur	150 722 922	164 358 587	195 007 612	220 439 111
20.	Kalimantan Barat	494 929 572	450 518 927	620 608 802	585 920 549
21.	Kalimantan Tengah	318 109 354	300 825 200	416 518 895	467 303 700
22.	Kalimantan Selatan	904 946 734	833 641 848	1 088 346 425	1 178 213 100
23.	Kalimantan Timur	1 561 637 233	1 539 702 678	2 023 934 390	1 992 500 000
24.	Sulawesi Utara	288 295 726	289 214 884	373 765 054	409 963 465
25.	Sulawesi Tengah	245 120 991	223 061 767	344 354 728	247 678 136
26.	Sulawesi Selatan	1 068 165 045	1 044 931 821	1 334 804 021	1 549 178 764
27.	Sulawesi Tenggara	150 462 599	171 402 251	202 929 981	205 977 997
28.	Gorontalo	82 572 431	86 443 156	120 748 491	110 427 279
29.	Sulawesi Barat	54 259 243	55 399 980	78 352 878	82 257 159
30.	M a l u k u	87 892 220	94 307 563	116 396 548	167 294 010
31.	Maluku Utara	55 753 310	51 029 373	61 999 098	61 568 197
32.	Papua Barat	66 519 244	65 295 146	99 847 508	80 050 000
33.	P a p u a	259 185 992	242 788 566	252 434 826	230 500 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>38 042 637 125</b>	<b>37 668 301 884</b>	<b>47 300 841 241</b>	<b>50 201 809 287</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.1.2

**REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH SELURUH**  
**INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL LOCAL REVENUE RETRIBUTION OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	12 002 090	12 040 363	7 493 489	13 264 165
2.	Sumatera Utara	29 409 174	29 456 736	35 813 385	21 105 318
3.	Sumatera Barat	50 673 617	51 931 638	28 264 854	30 576 475
4.	R i a u	28 016 663	36 428 217	6 897 102	7 296 102
5.	J a m b i	26 952 822	36 852 013	43 609 629	5 780 512
6.	Sumatera Selatan	13 507 720	14 770 365	17 747 278	18 950 050
7.	Bengkulu	42 495 507	49 231 277	59 610 610	12 305 420
8.	Lampung	71 175 337	75 266 014	7 159 463	6 746 202
9.	Bangka Belitung	3 000 947	4 043 048	2 628 024	1 801 603
10.	Kepulauan Riau	1 903 566	3 560 000	1 475 997	1 677 500
11.	DKI Jakarta	395 639 568	416 899 029	439 210 908	425 000 000
12.	Jawa Barat	35 398 711	36 717 162	32 248 950	43 063 416
13.	Jawa Tengah	321 963 375	127 405 511	127 651 269	53 758 076
14.	D I Yogyakarta	29 259 898	34 785 229	34 116 476	37 709 418
15.	Jawa Timur	309 323 367	75 950 583	66 237 597	56 350 359
16.	Banten	3 184 527	2 921 743	3 207 707	2 818 000
17.	B a l i	18 948 030	21 111 558	20 940 232	24 766 394
18.	Nusa Tenggara Barat	37 635 219	47 581 597	54 900 839	67 556 593
19.	Nusa Tenggara Timur	32 817 661	44 389 652	47 973 591	10 046 902
20.	Kalimantan Barat	39 085 749	70 156 538	78 579 088	72 825 340
21.	Kalimantan Tengah	23 495 499	24 073 562	25 282 312	6 297 600
22.	Kalimantan Selatan	21 362 670	124 902 899	41 660 161	38 359 736
23.	Kalimantan Timur	182 804 915	5 621 676	10 787 074	14 344 930
24.	Sulawesi Utara	6 188 412	7 566 535	11 933 613	6 591 421
25.	Sulawesi Tengah	19 892 824	20 731 195	29 650 214	39 395 960
26.	Sulawesi Selatan	72 972 983	100 604 093	108 560 877	111 167 662
27.	Sulawesi Tenggara	19 790 109	40 252 603	51 035 765	41 102 722
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	1 346 143	1 407 597	1 908 405	3 019 920
30.	M a l u k u	19 480 368	21 641 650	25 304 142	25 535 114
31.	Maluku Utara	4 855 112	12 450 354	10 542 401	14 786 167
32.	Papua Barat	21 668	254 577	1 091 318	1 490 000
33.	P a p u a	19 710 392	20 576 683	21 171 950	20 500 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 894 314 643</b>	<b>1 571 581 697</b>	<b>1 454 694 720</b>	<b>1 235 989 077</b>

\*) Data APBD



REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH  
DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH INDONESIA  
(ribu rupiah), 2008-2011

TABEL  
TABLE 3.1.3

ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOVERNMENT CORPORATE AND SEPARATED  
PROVINCIAL GOVERNMENT WEALTH THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs),  
2008-2011

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	66 796 142	75 104 468	98 845 197	102 000 000
2.	Sumatera Utara	89 673 273	90 518 048	166 320 144	201 173 204
3.	Sumatera Barat	36 480 958	39 582 354	46 814 067	62 321 907
4.	R i a u	67 025 056	101 704 377	108 478 460	131 478 460
5.	J a m b i	6 303 508	9 551 179	12 443 520	10 881 827
6.	Sumatera Selatan	42 441 999	56 809 947	61 183 357	73 136 000
7.	Bengkulu	7 443 690	12 286 352	10 895 322	12 101 760
8.	Lampung	11 205 126	12 137 116	12 869 366	18 244 940
9.	Bangka Belitung	1 023 524	1 771 547	3 077 328	1 800 000
10.	Kepulauan Riau	0	680 000	0	0
11.	DKI Jakarta	163 151 310	181 130 584	223 005 616	225 000 000
12.	Jawa Barat	138 674 865	179 835 133	226 365 880	225 178 842
13.	Jawa Tengah	131 312 950	153 848 190	195 631 744	193 576 967
14.	D I Yogyakarta	12 481 051	20 094 713	26 333 870	30 557 391
15.	Jawa Timur	195 402 284	227 446 226	243 826 826	315 158 898
16.	Banten	21 478 617	29 415 352	37 874 447	37 678 635
17.	B a l i	45 593 209	53 713 430	60 788 386	64 229 348
18.	Nusa Tenggara Barat	17 161 166	25 192 762	40 937 455	122 951 310
19.	Nusa Tenggara Timur	12 707 326	11 452 770	19 826 431	30 000 000
20.	Kalimantan Barat	18 239 410	25 241 502	35 202 158	38 257 586
21.	Kalimantan Tengah	12 297 018	22 897 144	17 303 860	17 500 000
22.	Kalimantan Selatan	19 000 527	23 035 518	8 388 793	35 700 000
23.	Kalimantan Timur	73 576 449	121 104 217	137 612 246	130 146 500
24.	Sulawesi Utara	12 902 773	16 369 246	13 553 666	20 000 000
25.	Sulawesi Tengah	4 093 853	7 525 806	11 384 015	14 299 745
26.	Sulawesi Selatan	54 831 924	59 350 545	51 551 621	63 577 263
27.	Sulawesi Tenggara	11 732 028	4 871 004	14 103 892	14 150 010
28.	Gorontalo	163 912	0	0	550 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	2 522	0
30.	M a l u k u	1 034 628	16 500 000	17 061 249	18 950 000
31.	Maluku Utara	0	0	76 190	0
32.	Papua Barat	0	0	1 096 715	4 386 860
33.	P a p u a	26 418 178	28 926 620	30 340 833	29 175 000
	<b>JUMLAH/TOTAL</b>	<b>1 300 646 754</b>	<b>1 608 096 150</b>	<b>1 933 195 176</b>	<b>2 244 162 453</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.1.4

**REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH SELURUH  
INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL PROVINCIAL GOV. REVENUE FROM OTHER PROVINCIAL GOV. ORIGINAL  
REVENUE THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	173 175 378	185 909 185	169 284 325	59 315 000
2.	Sumatera Utara	60 224 541	61 416 259	81 171 854	69 880 837
3.	Sumatera Barat	32 561 552	28 962 698	163 017 653	82 057 647
4.	R i a u	108 120 661	142 087 626	123 889 759	158 289 760
5.	J a m b i	65 845 159	41 505 205	28 220 910	24 542 708
6.	Sumatera Selatan	56 990 415	87 425 395	65 440 685	85 766 205
7.	Bengkulu	24 930 068	22 587 739	20 781 526	103 441 431
8.	Lampung	34 787 177	47 490 472	146 995 598	174 465 880
9.	Bangka Belitung	30 074 234	25 361 265	26 201 884	24 912 852
10.	Kepulauan Riau	13 138 694	13 264 294	26 965 078	21 240 851
11.	DKI Jakarta	1 145 500 880	1 442 893 419	1 478 030 507	1 663 580 847
12.	Jawa Barat	174 639 775	381 650 437	522 762 020	274 481 095
13.	Jawa Tengah	177 437 041	482 704 947	568 150 218	521 542 014
14.	D I Yogyakarta	65 946 009	49 073 343	45 041 711	39 573 511
15.	Jawa Timur	225 802 121	512 817 225	1 261 145 254	1 123 533 622
16.	Banten	34 894 855	37 562 477	72 420 806	37 600 000
17.	B a l i	47 276 576	61 408 013	90 819 547	58 622 592
18.	Nusa Tenggara Barat	26 857 430	30 041 988	27 812 321	59 304 113
19.	Nusa Tenggara Timur	41 038 255	35 473 608	35 346 703	82 745 306
20.	Kalimantan Barat	34 559 927	33 658 683	42 853 148	36 331 654
21.	Kalimantan Tengah	26 763 688	34 224 503	45 112 324	173 803 850
22.	Kalimantan Selatan	107 251 105	39 876 065	147 863 233	140 028 000
23.	Kalimantan Timur	252 274 007	541 880 548	542 481 837	504 243 000
24.	Sulawesi Utara	15 193 882	17 933 003	19 485 328	15 200 000
25.	Sulawesi Tengah	9 746 327	23 872 466	26 408 183	24 249 275
26.	Sulawesi Selatan	42 720 450	37 879 709	50 673 190	58 223 676
27.	Sulawesi Tenggara	114 618 721	6 602 623	71 291 181	160 269 529
28.	Gorontalo	11 775 618	16 182 862	12 399 161	11 789 462
29.	Sulawesi Barat	6 250 238	7 637 145	9 943 777	24 798 800
30.	M a l u k u	11 634 138	13 739 832	10 807 008	10 222 800
31.	Maluku Utara	14 729 789	9 812 681	5 225 054	4 324 085
32.	Papua Barat	9 949 136	8 068 176	23 738 786	13 035 182
33.	P a p u a	52 427 193	77 435 243	76 078 024	24 000 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 249 135 040</b>	<b>4 558 439 134</b>	<b>6 037 858 593</b>	<b>5 865 415 584</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 3.2  
**TABLE**

**REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN SELURUH  
INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL REVENUE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT FROM BALANCED BUDGET  
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 605 330 983	1 570 603 947	984 662 488	1 065 890 270
2.	Sumatera Utara	1 039 050 126	1 167 565 492	1 247 727 249	1 271 126 608
3.	Sumatera Barat	744 202 076	789 839 834	785 574 959	894 605 039
4.	R i a u	2 687 363 826	1 879 148 800	2 986 535 692	2 683 189 627
5.	J a m b i	745 860 901	802 060 280	932 205 660	827 819 942
6.	Sumatera Selatan	1 424 573 687	1 333 161 326	1 823 059 237	1 859 991 000
7.	Bengkulu	529 784 756	589 497 876	598 799 426	694 595 975
8.	Lampung	817 632 624	829 026 291	908 420 168	987 944 600
9.	Bangka Belitung	545 937 871	557 876 173	519 288 576	600 306 954
10.	Kepulauan Riau	950 291 648	1 077 053 057	1 310 792 978	1 270 951 672
11.	DKI Jakarta	8 702 813 394	8 650 835 930	9 537 609 058	8 909 900 000
12.	Jawa Barat	1 903 729 826	2 172 729 228	2 427 857 461	2 096 137 569
13.	Jawa Tengah	1 504 184 018	1 691 853 080	1 811 657 949	1 689 618 090
14.	D I Yogyakarta	601 802 167	631 011 121	626 677 339	714 542 343
15.	Jawa Timur	1 798 151 003	2 093 556 409	2 445 304 862	2 267 158 148
16.	Banten	686 651 066	744 966 513	812 654 174	841 416 056
17.	B a l i	576 550 871	636 608 487	649 257 693	706 007 314
18.	Nusa Tenggara Barat	626 994 173	701 175 944	756 256 439	877 930 981
19.	Nusa Tenggara Timur	708 740 588	767 566 614	773 795 618	859 954 981
20.	Kalimantan Barat	865 203 181	970 706 171	920 636 282	1 000 796 784
21.	Kalimantan Tengah	859 670 385	913 061 727	921 225 167	1 022 611 330
22.	Kalimantan Selatan	790 997 259	1 004 989 665	930 124 574	1 013 864 720
23.	Kalimantan Timur	4 050 186 678	3 122 061 454	4 308 464 375	3 798 310 520
24.	Sulawesi Utara	613 566 528	674 267 802	650 530 096	703 999 207
25.	Sulawesi Tengah	701 889 829	756 439 213	759 172 265	839 180 014
26.	Sulawesi Selatan	894 934 381	914 502 834	959 942 494	1 090 322 404
27.	Sulawesi Tenggara	657 211 240	705 062 822	691 637 811	799 080 260
28.	Gorontalo	413 118 212	458 560 308	438 419 416	513 873 300
29.	Sulawesi Barat	432 964 939	482 372 729	456 339 988	511 710 833
30.	M a l u k u	648 432 736	704 206 719	715 451 154	817 136 650
31.	Maluku Utara	571 207 517	612 479 040	604 964 763	641 623 611
32.	Papua Barat	856 776 413	1 030 362 654	1 462 347 938	1 332 510 409
33.	P a p u a	1 436 993 483	1 563 054 901	1 762 534 290	1 570 107 391
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>42 992 798 385</b>	<b>42 598 264 441</b>	<b>47 519 927 639</b>	<b>46 774 214 602</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 3.2.1  
**TABLE**

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMDA PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL REVENUE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT TAX SHARE THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	272 366 381	175 323 122	201 970 863	84 531 696
2.	Sumatera Utara	306 252 063	354 949 737	403 523 966	338 977 742
3.	Sumatera Barat	85 861 993	86 636 422	103 327 542	87 581 554
4.	R i a u	395 716 641	407 314 202	555 978 232	461 362 063
5.	J a m b i	130 385 477	133 568 381	157 838 823	138 445 615
6.	Sumatera Selatan	294 438 302	323 125 392	431 004 842	468 221 682
7.	Bengkulu	37 604 403	46 526 570	52 026 355	48 107 516
8.	Lampung	91 339 873	98 328 704	130 179 866	147 058 396
9.	Bangka Belitung	41 571 829	44 007 941	52 057 507	41 655 386
10.	Kepulauan Riau	174 674 004	193 843 308	234 376 006	230 979 970
11.	DKI Jakarta	8 526 794 673	8 580 181 350	9 398 613 244	8 600 000 000
12.	Jawa Barat	906 558 068	939 646 464	1 113 053 612	789 034 861
13.	Jawa Tengah	443 381 492	547 901 611	604 154 702	482 805 958
14.	D I Yogyakarta	70 549 425	73 677 652	87 816 512	74 233 804
15.	Jawa Timur	775 290 376	941 891 859	1 165 084 944	854 290 870
16.	Banten	324 786 786	351 030 720	416 150 982	335 430 560
17.	B a l i	115 383 052	128 712 266	150 963 833	124 112 775
18.	Nusa Tenggara Barat	59 770 703	65 768 462	112 925 607	108 410 320
19.	Nusa Tenggara Timur	53 762 651	54 842 414	68 647 419	65 965 997
20.	Kalimantan Barat	94 135 838	160 261 092	127 979 083	106 303 040
21.	Kalimantan Tengah	108 900 477	113 202 095	129 086 986	124 980 000
22.	Kalimantan Selatan	114 685 226	116 001 431	142 683 191	131 500 000
23.	Kalimantan Timur	548 180 146	576 616 211	653 810 498	592 078 000
24.	Sulawesi Utara	51 658 171	61 298 807	73 405 246	54 034 720
25.	Sulawesi Tengah	52 187 114	65 468 194	69 360 924	54 988 024
26.	Sulawesi Selatan	177 167 583	197 154 690	217 385 913	216 491 821
27.	Sulawesi Tenggara	50 637 799	53 254 936	64 736 445	60 535 103
28.	Gorontalo	18 679 714	18 683 429	26 766 048	24 678 000
29.	Sulawesi Barat	20 304 273	24 770 036	32 835 423	33 851 333
30.	M a l u k u	56 952 774	55 303 238	72 048 913	65 634 311
31.	Maluku Utara	50 520 990	49 775 494	69 097 630	36 082 919
32.	Papua Barat	175 669 065	167 370 968	184 845 998	173 501 140
33.	P a p u a	198 461 592	203 582 807	252 799 170	199 789 082
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>14 824 628 954</b>	<b>15 410 020 005</b>	<b>17 556 536 325</b>	<b>15 355 654 258</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.2.2

**REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMDA  
PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL REVENUE OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT NON TAX SHARE /NATURAL  
RESOURCES THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 765 016 546	837 405 601	118 201 135	214 101 102
2.	Sumatera Utara	4 887 241	5 257 935	2 317 944	8 454 328
3.	Sumatera Barat	1 981 379	7 081 400	5 428 657	1 609 290
4.	R i a u	2 093 271 986	1 299 983 640	2 349 319 803	1 747 807 941
5.	J a m b i	122 217 742	159 865 020	265 593 366	175 569 307
6.	Sumatera Selatan	584 359 252	502 680 051	862 163 718	847 399 318
7.	Bengkulu	2 088 742	2 354 812	2 747 881	2 490 823
8.	Lampung	133 030 821	62 175 914	107 290 368	105 189 374
9.	Bangka Belitung	93 494 502	60 310 388	48 516 961	53 220 453
10.	Kepulauan Riau	480 931 786	459 146 269	761 696 229	696 485 711
11.	DKI Jakarta	176 018 721	70 654 580	138 995 814	100 000 000
12.	Jawa Barat	92 812 843	248 784 940	190 109 609	79 785 000
13.	Jawa Tengah	7 310 655	9 771 868	10 411 240	8 458 375
14.	D I Yogyakarta	11 348	3 521	5 480	6 611
15.	Jawa Timur	0	15 185 200	10 302 953	10 334 379
16.	Banten	1 023 419	635 706	863 573	422 213
17.	B a l i	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	18 721 992	32 951 518	45 501 002	47 595 664
19.	Nusa Tenggara Timur	57 683	234 197	263 132	239 340
20.	Kalimantan Barat	11 891 129	12 296 934	7 915 306	10 640 356
21.	Kalimantan Tengah	40 377 818	45 741 426	51 961 488	49 900 000
22.	Kalimantan Selatan	173 713 826	361 576 568	309 529 316	374 000 000
23.	Kalimantan Timur	3 375 771 283	2 523 474 916	3 620 846 163	3 116 597 570
24.	Sulawesi Utara	913 190	1 455 064	904 637	965 280
25.	Sulawesi Tengah	4 379 754	1 516 833	1 883 270	2 254 842
26.	Sulawesi Selatan	25 918 855	9 076 750	7 003 880	15 120 114
27.	Sulawesi Tenggara	10 272 059	5 645 752	7 106 547	3 904 000
28.	Gorontalo	426 502	205 623	167 648	20 000
29.	Sulawesi Barat	247 994	489 187	222 988	420 000
30.	M a l u k u	2 292 760	2 472 684	3 058 590	2 850 689
31.	Maluku Utara	32 723 068	20 533 886	30 000 369	13 917 081
32.	Papua Barat	52 619 814	198 655 957	649 958 976	418 025 459
33.	P a p u a	201 897 066	219 971 330	286 182 154	221 577 418
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>9 510 681 776</b>	<b>7 177 595 470</b>	<b>9 896 470 197</b>	<b>8 329 362 038</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.2.3

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMDA PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. GENERAL ALOCATION FUNDS THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	557 327 156	509 686 224	621 074 916	716 646 172
2.	Sumatera Utara	727 910 822	761 054 820	812 747 639	894 556 838
3.	Sumatera Barat	631 791 704	648 943 012	662 403 385	764 680 895
4.	R i a u	198 375 199	171 850 958	58 869 157	380 051 123
5.	J a m b i	468 803 682	473 505 879	488 743 471	489 069 420
6.	Sumatera Selatan	545 776 133	507 355 883	512 083 577	512 083 000
7.	Bengkulu	482 472 811	487 339 494	523 041 290	607 388 036
8.	Lampung	570 533 930	628 505 673	643 376 134	708 123 030
9.	Bangka Belitung	391 045 440	407 994 844	410 642 308	481 589 915
10.	Kepulauan Riau	288 884 858	403 132 480	310 161 843	338 927 091
11.	DKI Jakarta	0	0	0	209 900 000
12.	Jawa Barat	904 358 915	984 297 824	1 086 123 940	1 181 553 108
13.	Jawa Tengah	1 053 491 871	1 130 742 601	1 168 787 757	1 168 787 757
14.	D I Yogyakarta	511 773 394	523 919 948	527 471 247	620 812 328
15.	Jawa Timur	1 022 860 627	1 118 478 350	1 212 934 765	1 347 501 699
16.	Banten	342 743 861	361 179 087	381 979 019	460 383 683
17.	B a l i	448 187 419	471 788 221	489 942 535	560 673 539
18.	Nusa Tenggara Barat	511 286 478	554 431 964	573 065 430	646 671 083
19.	Nusa Tenggara Timur	616 601 854	652 757 003	674 635 569	752 057 444
20.	Kalimantan Barat	728 080 795	744 834 145	755 123 093	845 483 888
21.	Kalimantan Tengah	670 213 090	694 822 206	707 880 493	795 816 330
22.	Kalimantan Selatan	466 559 207	484 059 666	458 074 767	483 364 720
23.	Kalimantan Timur	126 235 249	18 159 327	164 514	51 446 850
24.	Sulawesi Utara	532 916 167	558 634 931	558 781 013	619 711 007
25.	Sulawesi Tengah	606 544 317	629 397 186	659 331 271	743 757 969
26.	Sulawesi Selatan	656 710 943	663 422 394	706 276 399	816 757 969
27.	Sulawesi Tenggara	566 435 382	589 844 134	595 762 419	700 836 557
28.	Gorontalo	368 637 996	388 325 256	400 750 820	461 118 100
29.	Sulawesi Barat	366 674 672	391 060 506	405 749 577	441 578 800
30.	M a l u k u	556 236 402	578 163 797	607 572 176	703 993 950
31.	Maluku Utara	451 481 459	458 511 660	479 480 664	540 389 811
32.	Papua Barat	578 084 261	595 755 729	605 786 464	700 444 910
33.	P a p u a	1 002 431 825	1 058 227 764	1 148 497 966	1 148 740 891
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>17 951 467 919</b>	<b>18 650 182 966</b>	<b>19 247 315 618</b>	<b>21 894 897 913</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.2.4

**REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMDA PROVINSI SELURUH  
INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL REVENUE OF PROVINCIAL GOV. SPECIAL ALOCATION FUNDS THROUGHOUT  
INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	10 620 900	48 189 000	43 415 574	50 611 300
2.	Sumatera Utara	0	46 303 000	29 137 700	29 137 700
3.	Sumatera Barat	24 567 000	47 179 000	14 415 375	40 733 300
4.	R i a u	0	0	22 368 500	93 968 500
5.	J a m b i	24 454 000	35 121 000	20 030 000	24 735 600
6.	Sumatera Selatan	0	0	17 807 100	32 287 000
7.	Bengkulu	7 618 800	53 277 000	20 983 900	36 609 600
8.	Lampung	22 728 000	40 016 000	27 573 800	27 573 800
9.	Bangka Belitung	19 826 100	45 563 000	8 071 800	23 841 200
10.	Kepulauan Riau	5 801 000	20 931 000	4 558 900	4 558 900
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	0	0	38 570 300	45 764 600
13.	Jawa Tengah	0	3 437 000	28 304 250	29 566 000
14.	D I Yogyakarta	19 468 000	33 410 000	11 384 100	19 489 600
15.	Jawa Timur	0	18 001 000	56 982 200	55 031 200
16.	Banten	18 097 000	32 121 000	13 660 600	45 179 600
17.	B a l i	12 980 400	36 108 000	8 351 325	21 221 000
18.	Nusa Tenggara Barat	37 215 000	48 024 000	24 764 400	75 253 914
19.	Nusa Tenggara Timur	38 318 400	59 733 000	30 249 498	41 692 200
20.	Kalimantan Barat	31 095 419	53 314 000	29 618 800	38 369 500
21.	Kalimantan Tengah	40 179 000	59 296 000	32 296 200	51 915 000
22.	Kalimantan Selatan	36 039 000	43 352 000	19 837 300	25 000 000
23.	Kalimantan Timur	0	3 811 000	33 643 200	38 188 100
24.	Sulawesi Utara	28 079 000	52 879 000	17 439 200	29 288 200
25.	Sulawesi Tengah	38 778 644	60 057 000	28 596 800	38 179 179
26.	Sulawesi Selatan	35 137 000	44 849 000	29 276 302	41 952 500
27.	Sulawesi Tenggara	29 866 000	56 318 000	24 032 400	33 804 600
28.	Gorontalo	25 374 000	51 346 000	10 734 900	28 057 200
29.	Sulawesi Barat	45 738 000	66 053 000	17 532 000	35 860 700
30.	M a l u k u	32 950 800	68 267 000	32 771 475	44 657 700
31.	Maluku Utara	36 482 000	83 658 000	26 386 100	51 233 800
32.	Papua Barat	50 403 273	68 580 000	21 756 500	40 538 900
33.	P a p u a	34 203 000	81 273 000	75 055 000	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>706 019 736</b>	<b>1 360 466 000</b>	<b>819 605 499</b>	<b>1 194 300 393</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.3

**REALISASI PENERIMAAN LAINNYA PEMDA PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah),  
2008-2011**  
**ACTUAL OTHER RECEIPTS OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT  
INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 590 142 897	3 736 658 043	5 186 203 171	5 226 484 408
2.	Sumatera Utara	5 491 598	28 919 884	83 128 574	27 755 746
3.	Sumatera Barat	189 477 721	496 654 238	128 575 477	5 215 000
4.	R i a u	0	350 550	21 044 175	90 350 000
5.	J a m b i	64 410 340	25 398 107	21 350 836	0
6.	Sumatera Selatan	9 992 143	10 191 705	30 016 490	11 789 000
7.	Bengkulu	263 655 250	37 078 530	50 969 719	29 850 000
8.	Lampung	13 622 459	53 002 723	64 923 055	88 800 000
9.	Bangka Belitung	0	169 125	614 512	50 000 000
10.	Kepulauan Riau	0	0	20 790 151	20 859 601
11.	DKI Jakarta	63 378 946	0	596 385 753	1 146 719 828
12.	Jawa Barat	96 225 804	35 571 977	62 087 407	12 172 437
13.	Jawa Tengah	387 113	4 071 261	29 525 813	0
14.	D I Yogyakarta	23 935 467	9 910 813	7 325 681	4 593 565
15.	Jawa Timur	64 635 094	26 108 069	56 709 808	24 800 000
16.	Banten	3 560 805	3 408 242	5 197 014	4 182 500
17.	B a l i	33 000 000	101 671 504	194 719 389	188 019 295
18.	Nusa Tenggara Barat	9 500 000	341 325	620 663	12 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	0	264 450	16 121 504	0
20.	Kalimantan Barat	22 179 707	27 608 888	81 047 836	4 500 000
21.	Kalimantan Tengah	6 500 000	72 330 000	129 983 728	18 000 000
22.	Kalimantan Selatan	32 238 827	82 964 868	63 393 123	45 785 000
23.	Kalimantan Timur	7 023 939	18 555 695	21 276 953	10 090 000
24.	Sulawesi Utara	29 000 000	17 997 818	89 403 592	103 947 492
25.	Sulawesi Tengah	61 740 799	20 702 188	6 640 493	3 400 000
26.	Sulawesi Selatan	0	18 481 139	58 543 732	0
27.	Sulawesi Tenggara	4 034 070	102 528 828	24 175 000	0
28.	Gorontalo	28 944 110	0	21 848 025	0
29.	Sulawesi Barat	15 938 862	7 422 829	63 830 540	70 000 000
30.	M a l u k u	17 860 920	158 334 281	67 640 701	64 500 000
31.	Maluku Utara	30 000 000	0	13 021 032	2 321 551
32.	Papua Barat	569 500 000	1 718 613 750	1 819 680 723	1 954 234 904
33.	P a p u a	3 962 342 897	4 080 040 325	3 519 176 626	3 494 864 788
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>9 218 719 768</b>	<b>10 895 351 155</b>	<b>12 555 971 296</b>	<b>12 715 235 115</b>

\*) Data APBD



**TABEL**  
**TABLE** 3.B

**REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMDA PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL FINANCING RECEIPT OF LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	3 141 732 122	4 015 380 289	1 842 988 678	1 282 287 393
2.	Sumatera Utara	394 258 830	610 590 952	346 533 462	387 997 282
3.	Sumatera Barat	258 039 339	314 029 282	673 887 321	211 585 495
4.	R i a u	466 019 841	871 076 872	114 587 470	262 357 225
5.	J a m b i	359 487 858	386 301 605	201 204 877	100 000 000
6.	Sumatera Selatan	101 043 442	288 684 451	315 250 644	151 342 181
7.	Bengkulu	445 850 386	218 702 463	10 570 146	22 558 319
8.	Lampung	180 319 738	183 672 386	79 029 066	25 000 000
9.	Bangka Belitung	254 692 423	315 545 870	264 129 736	100 000 000
10.	Kepulauan Riau	184 315 626	391 953 213	242 173 799	242 173 799
11.	DKI Jakarta	1 364 256 321	4 446 373 058	3 748 512 147	2 428 534 745
12.	Jawa Barat	1 350 314 356	2 457 196 766	1 789 756 684	1 500 000 000
13.	Jawa Tengah	848 298 788	683 817 617	904 356 288	379 904 851
14.	D I Yogyakarta	537 060 364	285 824 679	256 568 355	203 425 611
15.	Jawa Timur	1 723 922 045	2 061 246 529	1 995 753 452	857 885 361
16.	Banten	149 104 130	237 720 327	235 495 508	572 000 000
17.	B a l i	282 503 094	468 108 450	538 452 871	340 378 604
18.	Nusa Tenggara Barat	71 073 304	63 928 652	73 514 841	122 273 107
19.	Nusa Tenggara Timur	310 377 666	268 175 864	224 112 521	187 460 125
20.	Kalimantan Barat	134 331 750	222 153 924	173 009 098	150 000 000
21.	Kalimantan Tengah	205 554 131	145 923 582	57 885 383	91 562 978
22.	Kalimantan Selatan	269 666 395	549 419 700	492 660 308	225 000 000
23.	Kalimantan Timur	2 361 237 901	2 007 208 728	808 568 904	958 000 000
24.	Sulawesi Utara	385 989 059	399 104 168	347 025 574	40 206 911
25.	Sulawesi Tengah	108 000 559	189 511 577	177 052 220	71 053 804
26.	Sulawesi Selatan	208 669 551	183 706 090	230 448 199	111 507 769
27.	Sulawesi Tenggara	61 603 700	124 465 203	106 197 607	311 279 052
28.	Gorontalo	128 731 650	123 276 331	65 070 534	59 411 446
29.	Sulawesi Barat	70 248 928	59 884 225	23 221 030	6 000 000
30.	M a l u k u	62 415 818	64 679 783	58 385 591	25 810 070
31.	Maluku Utara	26 220 676	81 106 646	2 872 955	18 932 778
32.	Papua Barat	193 508 717	49 003 746	129 160 000	156 500 000
33.	P a p u a	0	225 000 000	142 102 552	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>16 638 848 508</b>	<b>22 992 773 028</b>	<b>16 670 537 821</b>	<b>11 602 428 906</b>

\*) Data APBD



TABEL  

---

TABLE 4.

<http://www.bps.go.id>



**TABEL**  
**TABLE** 4

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA MENURUT  
JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA BY  
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b>INDIRECT EXPENDITURE</b>	<b>45 398 365 063</b>	<b>48 150 149 337</b>	<b>53 152 485 827</b>	<b>61 366 212 828</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	16 665 704 476	18 451 835 442	20 692 837 531	25 497 936 889
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	26 763 459	10 585 697	9 167 475	9 413 074
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	60 269 587	116 478 816	64 605 959	101 546 004
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	5 386 368 439	2 950 402 234	4 428 118 542	6 354 035 958
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	4 670 816 005	4 264 280 761	3 627 404 487	3 455 783 956
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	10 596 170 314	11 977 153 663	13 627 990 091	14 040 769 359
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	7 785 211 795	10 182 621 399	10 552 027 515	11 277 655 036
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	207 060 988	196 791 325	150 334 227	629 072 552
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b>DIRECT EXPENDITURE</b>	<b>43 212 462 677</b>	<b>53 734 476 550</b>	<b>59 000 922 032</b>	<b>66 658 796 697</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	5 372 239 813	6 075 451 038	6 669 635 011	6 074 963 065
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	18 943 346 819	23 412 329 896	26 992 274 147	33 474 505 704
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	18 896 876 045	24 246 695 616	25 339 012 874	27 109 327 928
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>24 726 272 483</b>	<b>20 008 181 602</b>	<b>21 319 618 627</b>	<b>2 614 245 499</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>113 337 100 223</b>	<b>121 892 807 489</b>	<b>133 473 026 486</b>	<b>130 639 255 024</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.1** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.1** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF ACEH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 399 227 139</b>	<b>2 198 662 228</b>	<b>2 361 186 746</b>	<b>2 739 530 705</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	472 798 576	672 820 728	740 542 103	908 212 518
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	6 873 157	598 869	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	224 051 269	433 398 506	532 841 778	755 092 389
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	476 205 553	669 645 983	768 357 850	626 225 798
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	226 171 741	313 843 984	312 466 642	250 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	100 000 000	0	150 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	2 079 870	6 379 504	50 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>4 316 396 527</b>	<b>5 444 184 777</b>	<b>5 167 329 622</b>	<b>5 338 387 438</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	167 960 961	288 692 582	295 570 080	291 231 599
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 538 708 908	1 459 188 116	1 603 848 155	3 424 369 848
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	2 609 726 658	3 696 304 079	3 267 911 387	1 622 785 991
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>4 337 873 301</b>	<b>2 415 001 063</b>	<b>1 282 287 393</b>	<b>294 028 927</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>10 053 496 967</b>	<b>10 057 848 068</b>	<b>8 810 803 761</b>	<b>8 371 947 070</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.2** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.2** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 794 384 366</b>	<b>2 066 194 068</b>	<b>1 991 472 765</b>	<b>2 031 752 186</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	559 784 809	646 246 722	679 253 395	643 505 926
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	34 172	25 888	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	247 062 083	125 559 525	316 329 250	313 239 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	117 761 735	215 176 817	71 955 050	49 944 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	683 336 924	656 050 047	609 775 367	701 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	186 095 993	420 526 785	313 433 815	304 063 260
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	342 822	2 600 000	700 000	20 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 172 966 429</b>	<b>1 378 366 514</b>	<b>1 675 233 409</b>	<b>2 646 109 276</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	145 590 665	161 214 215	138 095 739	176 940 549
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	447 635 101	512 815 247	820 332 048	1 146 619 468
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	579 740 663	704 337 052	716 805 622	1 322 549 259
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>652 761 352</b>	<b>378 589 070</b>	<b>565 463 428</b>	<b>190 917 706</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 620 112 147</b>	<b>3 823 149 652</b>	<b>4 232 169 602</b>	<b>4 868 779 168</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 4.3

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>906 350 514</b>	<b>769 822 721</b>	<b>1 031 743 732</b>	<b>1 117 210 213</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	367 200 832	396 240 062	452 838 728	566 925 357
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	24 627 500	16 760 000	56 700 222	33 378 500
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	35 067 065	29 514 325	55 567 604	63 215 920
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	229 537 664	266 352 364	290 666 129	381 850 200
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	249 798 708	58 531 460	172 924 980	66 839 698
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	118 745	2 424 510	3 046 069	5 000 538
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>731 349 975</b>	<b>887 581 198</b>	<b>1 208 009 760</b>	<b>1 006 471 449</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	55 511 523	66 105 352	79 094 896	92 216 375
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	313 735 522	359 444 050	545 847 300	463 860 545
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	362 102 930	462 031 796	583 067 564	450 394 529
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>344 106 415</b>	<b>682 866 528</b>	<b>355 105 212</b>	<b>74 479 901</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 981 806 904</b>	<b>2 340 270 447</b>	<b>2 594 858 704</b>	<b>2 198 161 563</b>

\*) Data APBD



**TABEL 4.4** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.4** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF RIAU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 461 090 879</b>	<b>1 640 706 475</b>	<b>1 633 624 557</b>	<b>1 831 202 765</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	494 528 836	621 727 937	740 029 953	740 736 593
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	9 647 815	11 033 095	15 272 310	14 172 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	210 432 870	144 952 300	148 675 000	229 050 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	285 311 665	257 669 138	216 582 000	181 981 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	378 069 861	530 344 005	459 865 294	573 585 672
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	65 835 387	73 880 000	43 200 000	81 677 500
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	17 264 445	1 100 000	10 000 000	10 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>2 196 798 941</b>	<b>2 116 774 369</b>	<b>2 633 808 101</b>	<b>2 637 054 966</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	401 647 794	288 674 411	330 284 401	220 810 585
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	599 884 464	708 706 089	882 439 925	1 006 646 514
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 195 266 683	1 119 393 869	1 421 083 775	1 409 597 867
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>973 073 220</b>	<b>345 508 122</b>	<b>194 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 630 963 040</b>	<b>4 102 988 966</b>	<b>4 461 432 658</b>	<b>4 538 257 731</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.5 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**TABLE** 4.5 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAMBI BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b>INDIRECT EXPENDITURE</b>	<b>511 724 076</b>	<b>685 176 280</b>	<b>672 267 047</b>	<b>652 324 655</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	296 561 580	326 068 007	336 141 292	380 029 715
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	5 984 070	8 688 823	130 000	370 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	3 592 607	7 438 278	64 358 881	19 896 707
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	3 282 617	22 222 754	37 191 082	59 369 300
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	198 770 202	172 865 736	222 916 085	189 158 933
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	3 250 000	145 217 847	9 900 000	0
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	283 000	2 674 835	1 629 707	3 500 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b>DIRECT EXPENDITURE</b>	<b>893 258 408</b>	<b>844 896 912</b>	<b>815 863 303</b>	<b>846 426 859</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	54 733 496	50 985 048	53 961 942	67 036 939
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	278 270 196	348 230 502	296 041 040	361 098 882
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	560 254 716	445 681 362	465 860 321	418 291 038
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>390 886 774</b>	<b>210 128 877</b>	<b>353 260 385</b>	<b>370 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 795 869 258</b>	<b>1 740 202 069</b>	<b>1 841 390 735</b>	<b>1 499 121 514</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.6** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.6** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SUMATERA SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>1 015 553 590</b>	<b>1 048 976 962</b>	<b>1 167 117 282</b>	<b>1 756 128 503</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	395 276 818	428 505 801	439 708 921	519 324 319
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	1 300 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	177 447 526	51 422 977	81 473 375	297 818 963
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	70 341 184	48 972 750	49 205 523	54 935 681
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	313 837 427	377 068 040	478 165 062	400 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	57 320 000	142 441 358	117 977 676	477 749 540
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 330 635	566 036	586 725	5 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>1 371 235 221</b>	<b>1 292 350 129</b>	<b>1 940 919 350</b>	<b>1 809 758 497</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	154 123 673	302 708 009	476 970 696	170 138 325
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	325 529 562	348 977 879	430 678 144	596 000 334
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	891 581 986	640 664 241	1 033 270 510	1 043 619 838
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>288 684 451</b>	<b>345 043 084</b>	<b>431 373 607</b>	<b>20 939 181</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 675 473 262</b>	<b>2 686 370 175</b>	<b>3 539 410 239</b>	<b>3 586 826 181</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.7** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.7** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BENGKULU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b>INDIRECT EXPENDITURE</b>	<b>316 885 817</b>	<b>393 018 762</b>	<b>521 635 607</b>	<b>574 073 994</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	216 218 077	207 914 247	329 366 252	369 297 430
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	11 327 426	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	1 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 579 000	28 124 859	61 461 173	21 600 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	13 989 636	147 513 000	20 358 540	11 591 160
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	66 125 836	0	99 105 386	127 660 404
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1 000 000	3 000 000	3 944 789	4 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	6 645 842	6 466 656	7 399 467	38 925 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b>DIRECT EXPENDITURE</b>	<b>932 780 371</b>	<b>539 471 542</b>	<b>449 562 954</b>	<b>581 692 510</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	53 699 610	75 619 091	44 005 108	65 481 079
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	490 766 233	214 738 228	240 495 882	286 514 807
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	388 314 528	249 114 223	165 061 964	229 696 624
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>278 702 464</b>	<b>200 570 145</b>	<b>40 232 218</b>	<b>12 758 970</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 528 368 652</b>	<b>1 133 060 449</b>	<b>1 011 430 779</b>	<b>1 168 525 474</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.8** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF LAMPUNG BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 062 018 773</b>	<b>1 053 357 172</b>	<b>968 441 248</b>	<b>1 090 584 311</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	343 068 313	386 715 733	416 719 262	507 303 165
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	144 369 023	32 877 000	38 365 623	36 172 755
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	137 112 682	111 879 041	89 264 670	81 450 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	415 383 957	407 169 916	378 733 817	353 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	3 000 000	23 157 821	18 000 000	90 300 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	19 084 798	91 557 661	27 357 876	22 358 391
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>648 996 390</b>	<b>793 750 676</b>	<b>1 036 457 939</b>	<b>1 090 584 311</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	77 346 004	73 709 559	84 733 817	140 613 096
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	362 818 709	486 751 068	525 914 922	450 802 232
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	208 831 677	233 290 049	425 809 200	499 168 983
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>192 341 218</b>	<b>78 951 378</b>	<b>165 814 010</b>	<b>6 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 903 356 381</b>	<b>1 926 059 226</b>	<b>2 170 713 197</b>	<b>2 187 168 622</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 4.9

**REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS  
PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANGKA BELITUNG BY  
KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>374 850 548</b>	<b>447 618 758</b>	<b>379 877 151</b>	<b>455 877 667</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	103 493 088	129 529 038	151 693 153	204 389 261
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	993 561	1 251 750	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	101 747 894	156 610 562	26 406 951	54 253 951
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	45 847 668	28 700 827	17 946 771	10 100 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	102 097 456	106 455 806	115 637 811	123 510 190
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	21 664 442	24 828 964	66 041 565	62 364 965
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	500 000	899 150	1 259 300
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>400 498 444</b>	<b>406 635 485</b>	<b>482 838 623</b>	<b>611 178 825</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	59 478 732	41 743 919	33 420 443	34 224 947
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	105 828 477	126 756 627	136 056 175	152 386 704
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	235 191 235	238 134 939	313 362 005	424 567 174
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>319 465 870</b>	<b>266 136 770</b>	<b>249 439 075</b>	<b>0</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 094 814 862</b>	<b>1 120 391 013</b>	<b>1 112 154 849</b>	<b>1 067 056 492</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.10** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.10** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KEPULAUAN RIAU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>378 063 178</b>	<b>478 816 048</b>	<b>525 340 406</b>	<b>570 057 166</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	129 074 239	176 695 579	162 989 135	184 799 741
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	4 176 915	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	37 366 477	47 932 814	114 556 707	118 700 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	47 341 958	72 112 807	74 480 407	92 562 298
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	155 581 589	175 274 848	164 514 157	164 995 127
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	3 990 500	5 000 000	8 500 000	8 500 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	531 500	1 800 000	300 000	500 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>770 873 667</b>	<b>1 369 537 165</b>	<b>1 198 234 307</b>	<b>1 408 702 834</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	81 887 760	219 272 896	179 428 467	191 410 018
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	399 783 218	426 505 931	367 237 269	398 514 203
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	289 202 689	723 758 338	651 568 571	818 778 613
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>391 953 213</b>	<b>2 600 000</b>	<b>372 188 859</b>	<b>5 440 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 540 890 058</b>	<b>1 850 953 213</b>	<b>2 095 763 572</b>	<b>1 984 200 000</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.11** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.11** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>6 201 068 273</b>	<b>6 248 430 051</b>	<b>6 972 751 160</b>	<b>9 534 312 666</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	5 676 127 360	5 874 593 713	6 513 005 171	8 521 388 651
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	14 998 360	9 943 209	7 421 194	4 353 828
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	177 020 390	305 274 309	423 468 762	865 613 817
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	329 840 768	58 020 461	27 517 450	58 527 900
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	0	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	598 359	1 338 583	1 350 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 081 395	0	0	83 078 470
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>9 755 457 813</b>	<b>13 251 881 680</b>	<b>14 580 144 679</b>	<b>18 341 494 454</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 918 187 026	1 672 843 080	2 024 843 081	1 212 460 197
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	5 255 670 595	6 773 237 465	7 312 154 901	9 071 099 996
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	2 581 600 192	4 805 801 135	5 243 146 697	8 057 934 261
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>4 629 488 116</b>	<b>4 197 955 215</b>	<b>5 221 603 301</b>	<b>631 928 300</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>20 586 014 202</b>	<b>23 698 266 946</b>	<b>26 774 499 140</b>	<b>28 507 735 420</b>

\*) Data APBD



**TABEL 4.12** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.12** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>4 543 594 281</b>	<b>5 691 756 883</b>	<b>6 265 732 992</b>	<b>7 120 176 460</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	870 783 080	1 001 707 347	1 380 786 123	1 729 926 991
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	20 450 000	10 394 197	12 194 120	51 400 293
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	295 623 566	120 587 340	156 022 746	268 887 100
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	242 238 519	232 864 154	192 865 500	335 892 519
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	1 777 489 318	2 075 846 644	2 064 745 161	2 155 197 969
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1 336 996 213	2 250 355 551	2 458 555 862	2 543 871 588
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	13 585	1 650	563 480	35 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 567 365 516</b>	<b>2 501 857 027</b>	<b>2 754 875 029</b>	<b>2 766 834 629</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	269 672 718	356 753 290	255 873 493	325 901 429
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	943 386 901	1 418 622 576	1 443 464 795	1 675 660 380
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	354 305 897	726 481 161	1 055 536 741	765 272 820
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>2 514 361 693</b>	<b>2 049 472 840</b>	<b>2 511 336 444</b>	<b>37 698 800</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 625 321 490</b>	<b>10 243 086 750</b>	<b>11 531 944 465</b>	<b>9 924 709 889</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.13** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.13** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>3 360 057 527</b>	<b>3 212 099 612</b>	<b>3 796 513 884</b>	<b>3 833 963 415</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	876 807 193	941 583 100	1 069 384 503	1 183 394 409
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	331	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	385 489 980	67 953 604	68 261 172	84 461 968
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	412 423 156	401 255 901	344 916 345	269 005 980
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	1 058 172 720	1 108 957 859	1 182 878 413	1 072 413 808
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	626 139 791	687 190 390	1 116 008 176	1 199 687 250
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 024 356	5 158 758	15 065 275	25 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 802 604 949</b>	<b>1 988 013 501</b>	<b>2 171 519 886</b>	<b>2 228 186 583</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	250 055 680	213 820 985	209 968 578	206 957 607
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 022 442 666	1 227 133 928	1 542 074 984	1 592 170 854
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	530 106 603	547 058 588	419 476 324	429 058 122
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>889 050 921</b>	<b>1 180 364 556</b>	<b>1 562 639 507</b>	<b>190 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>6 051 713 397</b>	<b>6 380 477 669</b>	<b>7 530 673 277</b>	<b>6 252 149 998</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.14 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**TABLE** 4.14 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>915 745 609</b>	<b>696 922 383</b>	<b>788 491 846</b>	<b>849 118 418</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	295 501 942	310 260 956	335 693 916	443 439 504
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	54 966	45 778	19 464	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	293 366 860	15 550 887	89 895 292	7 618 834
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	77 120 813	96 290 500	88 513 100	105 752 387
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	201 741 159	198 385 862	214 667 402	215 127 693
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	46 900 000	76 388 400	56 967 000	67 180 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 059 869	0	2 735 672	10 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>537 540 673</b>	<b>630 565 465</b>	<b>566 102 212</b>	<b>741 667 293</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	77 683 468	86 714 402	98 929 829	91 459 903
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	268 023 479	350 913 012	339 709 271	500 033 871
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	191 833 726	192 938 051	127 463 112	150 173 519
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>342 384 028</b>	<b>244 404 316</b>	<b>276 179 393</b>	<b>32 115 000</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 795 670 310</b>	<b>1 571 892 164</b>	<b>1 630 773 451</b>	<b>1 622 900 711</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.15** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.15** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF JAWA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>4 322 174 904</b>	<b>4 318 899 232</b>	<b>5 869 745 632</b>	<b>5 797 640 028</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	986 157 099	1 075 189 346	1 283 591 782	1 497 004 814
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	296 036	167 634	4 878 212
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 283 926 009	540 816 992	682 406 822	974 301 072
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	559 004 250	72 471 414	47 627 536	87 714 900
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	1 452 594 469	1 883 301 032	2 326 860 423	2 229 468 218
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	16 689 728	746 137 792	1 503 834 280	963 160 439
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	23 803 349	686 620	25 257 155	41 112 373
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 881 485 690</b>	<b>3 283 139 576</b>	<b>4 336 571 471</b>	<b>4 828 721 360</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	21 201 965	483 186 941	668 598 067	833 869 936
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 311 774 043	1 962 652 643	2 790 096 474	3 094 388 943
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	548 509 682	837 299 992	877 876 930	900 462 481
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>2 595 366 864</b>	<b>2 286 902 536</b>	<b>1 769 981 099</b>	<b>138 525 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 799 027 458</b>	<b>9 888 941 344</b>	<b>11 976 298 202</b>	<b>10 764 886 388</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.16 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**TABLE** 4.16 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>1 165 236 019</b>	<b>1 173 761 522</b>	<b>1 304 622 476</b>	<b>1 764 096 862</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	239 413 280	294 424 404	280 475 124	345 901 047
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	86 405 822	57 693 815	92 374 984	340 463 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	36 219 525	48 116 100	51 428 250	51 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	592 012 917	581 405 598	736 769 053	730 617 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	208 700 000	190 121 605	139 455 065	291 115 815
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 484 475	2 000 000	4 120 000	5 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>1 088 746 693</b>	<b>1 247 059 419</b>	<b>1 529 948 052</b>	<b>1 721 198 329</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	138 702 929	106 741 193	110 267 532	130 439 190
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	356 095 626	457 752 098	593 057 823	937 361 151
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	593 948 138	682 566 128	826 622 697	653 397 988
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>246 501 923</b>	<b>252 995 508</b>	<b>540 362 606</b>	<b>11 400 000</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 500 484 635</b>	<b>2 673 816 449</b>	<b>3 374 933 134</b>	<b>3 496 695 191</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.17** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.17** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>1 024 532 462</b>	<b>1 290 952 454</b>	<b>1 496 158 141</b>	<b>1 721 708 748</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	377 193 055	427 346 486	465 179 737	610 185 763
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	31 034
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	3 300 000	4 509 360	4 479 600	4 480 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	117 265 529	15 637 208	190 010 205	216 814 302
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	152 013 312	305 087 740	313 295 312	325 959 800
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	289 079 348	453 053 519	485 833 043	475 286 523
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	85 650 114	79 755 937	24 486 688	34 294 869
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	31 104	5 562 204	12 873 556	54 656 457
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>439 693 880</b>	<b>520 146 882</b>	<b>489 691 916</b>	<b>762 188 088</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	40 754 468	35 605 364	18 489 741	30 571 442
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	276 840 973	277 484 606	269 734 074	363 509 633
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	122 098 439	207 056 912	201 468 101	368 107 013
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>485 619 400</b>	<b>559 236 657</b>	<b>790 310 153</b>	<b>0</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 949 845 742</b>	<b>2 370 335 993</b>	<b>2 776 160 210</b>	<b>2 483 896 836</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.18** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.18** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>593 847 410</b>	<b>724 553 299</b>	<b>859 304 825</b>	<b>935 732 471</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	284 952 928	357 906 776	385 403 837	452 993 579
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	8 902 900	6 542 700	4 929 176	5 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	55 103 227	29 666 258	116 432 115	138 594 666
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	110 313 355	84 700 290	96 006 383	107 311 951
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	118 225 000	164 138 371	201 232 154	190 666 844
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	16 300 000	80 725 984	53 986 075	39 165 431
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	50 000	872 920	1 315 085	2 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>449 099 055</b>	<b>375 984 593</b>	<b>416 441 760</b>	<b>721 360 699</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	58 036 638	45 188 420	55 334 233	40 506 185
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	217 322 931	196 983 101	216 550 122	281 622 830
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	173 739 486	133 813 072	144 557 405	399 231 684
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>94 843 371</b>	<b>136 896 845</b>	<b>69 986 315</b>	<b>65 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 137 789 836</b>	<b>1 237 434 737</b>	<b>1 345 732 900</b>	<b>1 722 093 170</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.19** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.19** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF NUSA TENGGARA TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>485 652 667</b>	<b>492 812 023</b>	<b>538 353 060</b>	<b>623 944 785</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	228 667 698	301 120 938	330 954 210	422 181 048
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	93 264 088	4 788 548	6 819 140	6 700 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	52 224 987	46 753 319	49 739 498	70 660 260
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	50 060 997	74 459 462	96 124 597	90 651 227
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	53 276 974	59 684 237	46 618 785	23 752 250
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	8 157 923	6 005 519	8 096 830	10 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>498 580 794</b>	<b>532 633 795</b>	<b>609 729 330</b>	<b>684 218 640</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	56 200 520	45 453 468	60 105 893	77 935 879
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	239 658 532	281 930 798	373 064 516	412 316 328
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	202 721 742	205 249 529	176 558 921	193 966 433
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>272 170 957</b>	<b>266 235 727</b>	<b>164 101 590</b>	<b>82 483 000</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 256 404 418</b>	<b>1 291 681 545</b>	<b>1 312 183 980</b>	<b>1 390 646 425</b>

\*) Data APBD



**TABEL 4.20** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT  
**JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN BARAT BY**  
**KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>561 627 303</b>	<b>750 990 445</b>	<b>774 185 007</b>	<b>888 515 819</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	287 833 932	329 735 284	346 501 098	413 869 263
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	750 000	35 712 500	50 451 332	65 525 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	66 279 882	20 806 946	8 820 600	9 670 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	166 939 489	218 142 029	237 066 027	252 846 180
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	39 824 000	146 523 985	129 787 680	142 318 876
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	69 701	1 558 270	4 286 500
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>799 332 607</b>	<b>876 021 859</b>	<b>926 017 322</b>	<b>965 116 094</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	61 463 897	61 145 490	58 641 977	77 003 473
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	327 122 350	450 379 483	490 478 825	525 733 914
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	410 746 360	364 496 886	376 896 520	362 378 707
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>247 569 386</b>	<b>173 032 329</b>	<b>251 734 083</b>	<b>35 000 000</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 608 529 296</b>	<b>1 800 044 633</b>	<b>1 951 936 412</b>	<b>1 888 631 913</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.21 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>421 228 751</b>	<b>496 250 002</b>	<b>622 766 793</b>	<b>879 913 775</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	217 159 593	248 296 583	252 238 309	334 905 593
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	1 882 052	16 721 050	20 623 607	20 623 711
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	882 000	13 646 758	106 724 002	30 725 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	41 543 262	35 149 721	40 211 363	138 796 453
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	133 960 232	167 793 818	182 468 533	225 639 395
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	25 769 815	14 491 572	18 927 354	47 490 700
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	31 797	150 500	1 573 625	81 732 923
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>855 132 640</b>	<b>975 028 246</b>	<b>854 581 382</b>	<b>838 102 705</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	52 027 335	56 373 955	60 521 483	94 916 357
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	229 465 902	291 817 269	252 766 611	325 019 502
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	573 639 403	626 837 022	541 293 288	418 166 846
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>176 028 684</b>	<b>42 057 470</b>	<b>135 963 494</b>	<b>79 062 978</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 452 390 075</b>	<b>1 513 335 718</b>	<b>1 613 311 669</b>	<b>1 797 079 458</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.22** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE** 4.22 **ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN SELATAN BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b>INDIRECT EXPENDITURE</b>	<b>765 453 382</b>	<b>962 700 759</b>	<b>1 142 533 972</b>	<b>1 218 426 010</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	317 010 588	371 228 225	422 266 361	557 778 360
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	64 106	37 126	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	210 000	33 257 670	98 645 652	51 131 650
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	91 521 188	110 089 207	100 762 508	81 641 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	344 000 000	402 276 473	500 000 000	500 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	10 500 000	43 720 897	18 650 302	24 875 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 147 500	2 091 161	2 209 149	3 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b>DIRECT EXPENDITURE</b>	<b>780 240 584</b>	<b>1 142 592 296</b>	<b>1 267 561 372</b>	<b>1 361 524 546</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	95 360 699	78 666 387	97 580 931	120 286 044
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	282 988 393	437 269 809	492 679 168	607 267 535
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	401 891 492	626 656 100	677 301 273	633 970 967
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>599 769 551</b>	<b>553 537 508</b>	<b>362 341 273</b>	<b>97 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 145 463 517</b>	<b>2 658 830 563</b>	<b>2 772 436 617</b>	<b>2 676 950 556</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.23** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.23** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF KALIMANTAN TIMUR BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>3 804 877 592</b>	<b>3 323 786 647</b>	<b>2 936 791 901</b>	<b>3 341 359 242</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	293 393 854	356 634 431	405 321 821	498 525 347
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	1 173 155 948	410 142 815	356 170 000	524 627 845
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	124 691 200	189 786 674	103 863 200	111 012 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	715 981 590	716 581 090	901 354 888	941 627 500
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1 496 655 000	1 650 627 262	1 170 081 992	1 250 566 550
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 000 000	14 375	0	15 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>2 551 506 899</b>	<b>2 985 472 214</b>	<b>2 981 776 194</b>	<b>3 916 275 708</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	342 289 063	416 481 970	472 870 254	581 606 506
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	554 858 140	705 567 895	854 936 271	1 340 775 744
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 654 359 696	1 863 422 349	1 653 969 669	1 993 893 458
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>2 132 356 631</b>	<b>1 046 876 135</b>	<b>1 934 557 684</b>	<b>150 000 000</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 488 741 122</b>	<b>7 356 134 996</b>	<b>7 853 125 779</b>	<b>7 407 634 950</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.24** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.24** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b>INDIRECT EXPENDITURE</b>	<b>498 152 958</b>	<b>518 508 871</b>	<b>632 041 039</b>	<b>689 405 671</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	293 926 794	296 788 691	328 811 980	420 522 794
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	8 749 940	22 057 250	114 013 707	35 382 877
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	58 539 064	54 721 180	46 816 745	45 720 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	107 099 262	136 687 892	137 100 431	172 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	29 500 000	6 000 000	4 000 000	5 780 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	337 898	2 253 858	1 298 176	10 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b>DIRECT EXPENDITURE</b>	<b>415 829 754</b>	<b>515 919 011</b>	<b>505 382 406</b>	<b>608 502 825</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	73 784 960	38 377 867	48 481 823	55 793 399
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	184 703 131	236 257 494	292 540 520	329 125 215
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	157 341 663	241 283 650	164 360 063	223 584 211
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>437 153 668</b>	<b>388 025 574</b>	<b>368 273 478</b>	<b>2 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 351 136 380</b>	<b>1 422 453 456</b>	<b>1 505 696 923</b>	<b>1 299 908 496</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.25** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.25** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGAH BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>414 235 264</b>	<b>467 376 968</b>	<b>504 698 487</b>	<b>609 547 717</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	225 128 671	258 665 067	291 205 304	346 850 174
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	34 289 279	34 174 084	58 608 736	114 809 804
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	33 138 731	16 407 712	13 923 701	8 200 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	80 057 810	112 284 226	93 456 633	100 183 626
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	41 620 773	45 845 879	47 504 113	34 504 113
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	0	5 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>540 498 372</b>	<b>592 355 452</b>	<b>622 558 234</b>	<b>623 009 217</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	48 331 512	58 952 351	59 207 689	69 135 573
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	289 497 279	321 587 887	359 558 245	378 369 365
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	202 669 581	211 815 214	203 792 300	175 504 279
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>195 751 546</b>	<b>182 111 792</b>	<b>227 405 397</b>	<b>6 700 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 150 485 182</b>	<b>1 241 844 212</b>	<b>1 354 662 118</b>	<b>1 239 256 934</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.26** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT  
**JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI SELATAN BY**  
**KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>1 322 638 511</b>	<b>1 236 898 965</b>	<b>1 500 511 910</b>	<b>1 847 672 901</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	413 690 300	481 693 704	500 173 240	627 706 995
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	318 270	229 376	146 029	150 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	0	79 196 000	84 095 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	151 586 443	73 519 402	25 016 900	22 098 500
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	423 728 417	362 740 344	503 954 303	645 842 280
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	329 563 873	318 120 459	389 647 141	452 780 126
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 751 208	595 680	2 378 297	15 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>811 882 058</b>	<b>885 292 826</b>	<b>985 647 855</b>	<b>1 124 604 637</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	101 518 645	121 502 604	122 037 635	141 765 239
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	435 182 478	467 927 554	559 961 996	597 016 212
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	275 180 935	295 862 668	303 648 224	385 823 186
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>207 773 765</b>	<b>237 264 440</b>	<b>308 364 369</b>	<b>11 700 000</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 342 294 334</b>	<b>2 359 456 231</b>	<b>2 794 524 134</b>	<b>2 983 977 538</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.27** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.27** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>448 772 298</b>	<b>446 271 525</b>	<b>597 811 705</b>	<b>742 384 816</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	221 936 814	286 532 407	312 193 785	378 701 304
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	22 973 208	17 724 952	7 860 207	8 700 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	19 347 164	10 019 035	75 477 400	19 692 500
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	71 578 547	60 160 658	79 660 625	49 176 799
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	108 046 245	70 729 017	120 671 756	281 114 213
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 890 320	1 105 456	1 947 932	5 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>450 469 558</b>	<b>673 428 860</b>	<b>527 876 246</b>	<b>663 445 162</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	77 721 452	111 288 327	64 253 626	40 522 603
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	222 612 223	260 377 147	228 258 763	210 936 035
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	150 135 883	301 763 386	235 363 857	411 986 524
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>120 210 611</b>	<b>35 484 949</b>	<b>35 683 286</b>	<b>126 029 592</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 019 452 467</b>	<b>1 155 185 334</b>	<b>1 161 371 237</b>	<b>1 531 859 570</b>

\*) Data APBD



**TABEL 4.28** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.28** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF GORONTALO BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>184 400 161</b>	<b>209 993 413</b>	<b>258 083 469</b>	<b>311 594 817</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	117 136 581	136 588 902	165 232 594	203 973 905
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	3 731 875	8 755 602	1 928 000	3 200 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	14 500 850	14 694 719	16 142 400	41 750 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	5 701 080	2 992 240	4 266 797	6 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	33 587 580	38 157 153	39 430 333	44 170 912
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	9 692 195	8 554 797	30 930 988	7 500 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	50 000	250 000	152 357	5 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>352 771 575</b>	<b>409 334 481</b>	<b>308 996 973</b>	<b>359 456 670</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	27 651 146	24 664 746	21 769 939	30 439 243
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	168 193 654	206 395 928	178 230 008	216 489 472
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	156 926 775	178 273 807	108 997 026	112 527 955
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>128 134 197</b>	<b>65 134 763</b>	<b>91 405 185</b>	<b>25 000 000</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>665 305 933</b>	<b>684 462 657</b>	<b>658 485 627</b>	<b>696 051 487</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.29** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.29** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF SULAWESI BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>107 876 721</b>	<b>103 782 681</b>	<b>125 638 652</b>	<b>239 281 336</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	52 339 830	65 104 705	77 197 534	133 839 488
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	2 091 514	700 000	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	6 799 363	5 593 400	10 568 975	53 067 500
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	22 480 763	8 476 557	6 814 352	10 983 350
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	21 067 000	22 054 524	29 262 966	35 772 998
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	817 400	0	0	3 618 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 372 365	461 981	1 094 825	2 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>412 313 051</b>	<b>486 381 131</b>	<b>482 033 514</b>	<b>468 529 041</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	56 256 109	45 749 520	56 863 864	58 307 117
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	146 120 254	198 827 504	220 105 790	217 458 715
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	209 936 688	241 804 107	205 063 860	192 763 209
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>60 818 581</b>	<b>23 960 693</b>	<b>25 926 974</b>	<b>- 10 023 665</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>581 008 353</b>	<b>614 124 505</b>	<b>633 599 140</b>	<b>697 786 712</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.30** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.30** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>366 660 508</b>	<b>384 430 188</b>	<b>378 672 694</b>	<b>482 308 190</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	206 599 327	226 880 039	265 114 043	342 797 225
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	1 387 266	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	2 193 960	39 875 757	2 498 527	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	58 587 876	24 566 104	22 417 069	20 850 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	39 290 454	35 648 605	23 821 897	28 231 500
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	34 803 544	44 793 866	60 881 792	53 515 133
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	3 000 000	4 052 260	966 655	3 019 332
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	22 185 347	8 613 557	1 585 445	33 895 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>413 984 128</b>	<b>631 377 457</b>	<b>571 608 481</b>	<b>642 190 454</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	52 043 712	74 958 073	54 342 524	59 092 086
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	212 297 387	384 271 757	358 404 729	352 231 418
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	149 643 029	172 147 627	158 861 228	230 866 950
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>68 106 192</b>	<b>57 602 183</b>	<b>60 765 218</b>	<b>4 950 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>848 750 828</b>	<b>1 073 409 828</b>	<b>1 011 046 393</b>	<b>1 129 448 644</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.31** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.31** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU UTARA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>268 213 779</b>	<b>233 270 452</b>	<b>242 969 257</b>	<b>224 592 222</b>
<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	159 701 755	143 280 152	163 837 449	184 827 274
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	18 370 900	11 709 420	11 381 334	1 600 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	56 107 261	55 743 894	36 025 107	3 300 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	33 593 533	21 596 986	31 225 367	33 464 948
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	271 830	0	0	900 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	168 500	940 000	500 000	500 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>		<b>377 283 949</b>	<b>526 245 692</b>	<b>439 753 927</b>	<b>506 247 778</b>
<b>DIRECT EXPENDITURE</b>					
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	39 221 245	63 777 116	39 362 004	24 099 043
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	158 556 450	209 412 283	207 866 680	214 121 047
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	179 506 254	253 056 293	192 525 243	268 027 688
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>57 268 676</b>	<b>7 361 950</b>	<b>15 978 309</b>	<b>12 716 389</b>
<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>					
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>702 766 404</b>	<b>766 878 094</b>	<b>698 701 493</b>	<b>743 556 389</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.32** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BARAT BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>589 067 757</b>	<b>1 421 270 401</b>	<b>1 523 644 287</b>	<b>2 095 780 898</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	83 034 561	88 294 588	109 575 055	212 125 978
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	81 727 355	123 634 000	167 638 800	362 185 758
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	222 614 545	201 824 296	137 627 569	89 431 300
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	31 356 896	24 592 297	281 843 427	466 300 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	170 334 400	982 925 220	824 959 436	960 737 862
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	0	2 000 000	5 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 057 922 986</b>	<b>1 298 078 469</b>	<b>1 581 127 628</b>	<b>1 421 401 037</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	55 797 078	67 839 852	78 071 808	107 563 658
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	295 498 032	411 425 727	507 173 804	726 660 595
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	706 627 876	818 812 890	995 882 016	587 176 784
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>49 284 435</b>	<b>152 249 179</b>	<b>432 191 073</b>	<b>25 025 420</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 696 275 178</b>	<b>2 871 598 049</b>	<b>3 536 962 988</b>	<b>3 542 207 355</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.33** REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 4.33** ACTUAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT OF PAPUA BY KIND OF EXPENDITURE (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG INDIRECT EXPENDITURE</b>		<b>3 813 102 046</b>	<b>2 962 081 087</b>	<b>2 767 756 097</b>	<b>2 795 993 396</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	563 203 073	585 515 744	559 412 361	610 573 358
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	5 630 000	442 780	61 440 130	176 928 500
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	534 314 520	500 127 971	391 137 477	237 806 499
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	90 127 829	104 319 214	109 328 770	96 039 780
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	2 537 008 414	1 723 487 561	1 640 726 759	1 653 377 659
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	82 818 210	48 187 817	5 710 600	21 267 600
<b>B. BELANJA LANGSUNG DIRECT EXPENDITURE</b>		<b>1 937 565 080</b>	<b>2 332 117 851</b>	<b>2 882 718 795</b>	<b>2 388 153 783</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	206 297 330	240 640 555	217 653 418	214 227 444
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	682 075 010	891 988 195	1 260 514 917	1 218 323 412
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1 049 192 740	1 199 489 101	1 404 550 460	955 602 927
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>		<b>6 411 009</b>	<b>943 623 400</b>	<b>153 364 209</b>	<b>185 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>5 757 078 135</b>	<b>6 237 822 338</b>	<b>5 803 839 101</b>	<b>5 369 147 179</b>

\*) Data APBD

TABEL  

---

TABLE 5.

<http://www.bps.go.id>





**TABEL**  
**TABLE** 5.A

**REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH**  
**INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL INDIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 399 227 139	2 198 662 228	2 361 186 746	2 739 530 705
2.	Sumatera Utara	1 794 384 366	2 066 194 068	1 991 472 765	2 031 752 186
3.	Sumatera Barat	906 350 514	769 822 721	1 031 743 732	1 117 210 213
4.	R i a u	1 461 090 879	1 640 706 475	1 633 624 557	1 831 202 765
5.	J a m b i	511 724 076	685 176 280	672 267 047	652 324 655
6.	Sumatera Selatan	1 015 553 590	1 048 976 962	1 167 117 282	1 756 128 503
7.	Bengkulu	316 885 817	393 018 762	521 635 607	574 073 994
8.	Lampung	1 062 018 773	1 053 357 172	968 441 248	1 090 584 311
9.	Bangka Belitung	374 850 548	447 618 758	379 877 151	455 877 667
10.	Kepulauan Riau	378 063 178	478 816 048	525 340 406	570 057 166
11.	DKI Jakarta	6 201 068 273	6 248 430 051	6 972 751 160	9 534 312 666
12.	Jawa Barat	4 543 594 281	5 691 756 883	6 265 732 992	7 120 176 460
13.	Jawa Tengah	3 360 057 527	3 212 099 612	3 796 513 884	3 833 963 415
14.	D I Yogyakarta	915 745 609	696 922 383	788 491 846	849 118 418
15.	Jawa Timur	4 322 174 904	4 318 899 232	5 869 745 632	5 797 640 028
16.	Banten	1 165 236 019	1 173 761 522	1 304 622 476	1 764 096 862
17.	B a l i	1 024 532 462	1 290 952 454	1 496 158 141	1 721 708 748
18.	Nusa Tenggara Barat	593 847 410	724 553 299	859 304 825	935 732 471
19.	Nusa Tenggara Timur	485 652 667	492 812 023	538 353 060	623 944 785
20.	Kalimantan Barat	561 627 303	750 990 445	774 185 007	888 515 819
21.	Kalimantan Tengah	421 228 751	496 250 002	622 766 793	879 913 775
22.	Kalimantan Selatan	765 453 382	962 700 759	1 142 533 972	1 218 426 010
23.	Kalimantan Timur	3 804 877 592	3 323 786 647	2 936 791 901	3 341 359 242
24.	Sulawesi Utara	498 152 958	518 508 871	632 041 039	689 405 671
25.	Sulawesi Tengah	414 235 264	467 376 968	504 698 487	609 547 717
26.	Sulawesi Selatan	1 322 638 511	1 236 898 965	1 500 511 910	1 847 672 901
27.	Sulawesi Tenggara	448 772 298	446 271 525	597 811 705	742 384 816
28.	Gorontalo	184 400 161	209 993 413	258 083 469	311 594 817
29.	Sulawesi Barat	107 876 721	103 782 681	125 638 652	239 281 336
30.	M a l u k u	366 660 508	384 430 188	378 672 694	482 308 190
31.	Maluku Utara	268 213 779	233 270 452	242 969 257	224 592 222
32.	Papua Barat	589 067 757	1 421 270 401	1 523 644 287	2 095 780 898
33.	P a p u a	3 813 102 046	2 962 081 087	2 767 756 097	2 795 993 396
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>45 398 365 063</b>	<b>48 150 149 337</b>	<b>53 152 485 827</b>	<b>61 366 212 828</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 5.A.1 **REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**TABLE** 5.A.1 **ACTUAL INDIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	472 798 576	672 820 728	740 542 103	908 212 518
2.	Sumatera Utara	559 784 809	646 246 722	679 253 395	643 505 926
3.	Sumatera Barat	367 200 832	396 240 062	452 838 728	566 925 357
4.	R i a u	494 528 836	621 727 937	740 029 953	740 736 593
5.	J a m b i	296 561 580	326 068 007	336 141 292	380 029 715
6.	Sumatera Selatan	395 276 818	428 505 801	439 708 921	519 324 319
7.	Bengkulu	216 218 077	207 914 247	329 366 252	369 297 430
8.	Lampung	343 068 313	386 715 733	416 719 262	507 303 165
9.	Bangka Belitung	103 493 088	129 529 038	151 693 153	204 389 261
10.	Kepulauan Riau	129 074 239	176 695 579	162 989 135	184 799 741
11.	DKI Jakarta	5 676 127 360	5 874 593 713	6 513 005 171	8 521 388 651
12.	Jawa Barat	870 783 080	1 001 707 347	1 380 786 123	1 729 926 991
13.	Jawa Tengah	876 807 193	941 583 100	1 069 384 503	1 183 394 409
14.	D I Yogyakarta	295 501 942	310 260 956	335 693 916	443 439 504
15.	Jawa Timur	986 157 099	1 075 189 346	1 283 591 782	1 497 004 814
16.	Banten	239 413 280	294 424 404	280 475 124	345 901 047
17.	B a l i	377 193 055	427 346 486	465 179 737	610 185 763
18.	Nusa Tenggara Barat	284 952 928	357 906 776	385 403 837	452 993 579
19.	Nusa Tenggara Timur	228 667 698	301 120 938	330 954 210	422 181 048
20.	Kalimantan Barat	287 833 932	329 735 284	346 501 098	413 869 263
21.	Kalimantan Tengah	217 159 593	248 296 583	252 238 309	334 905 593
22.	Kalimantan Selatan	317 010 588	371 228 225	422 266 361	557 778 360
23.	Kalimantan Timur	293 393 854	356 634 431	405 321 821	498 525 347
24.	Sulawesi Utara	293 926 794	296 788 691	328 811 980	420 522 794
25.	Sulawesi Tengah	225 128 671	258 665 067	291 205 304	346 850 174
26.	Sulawesi Selatan	413 690 300	481 693 704	500 173 240	627 706 995
27.	Sulawesi Tenggara	221 936 814	286 532 407	312 193 785	378 701 304
28.	Gorontalo	117 136 581	136 588 902	165 232 594	203 973 905
29.	Sulawesi Barat	52 339 830	65 104 705	77 197 534	133 839 488
30.	M a l u k u	206 599 327	226 880 039	265 114 043	342 797 225
31.	Maluku Utara	159 701 755	143 280 152	163 837 449	184 827 274
32.	Papua Barat	83 034 561	88 294 588	109 575 055	212 125 978
33.	P a p u a	563 203 073	585 515 744	559 412 361	610 573 358
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>16 665 704 476</b>	<b>18 451 835 442</b>	<b>20 692 837 531</b>	<b>25 497 936 889</b>

\*) Data APBD

**TABEL 5.A.2** REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 5.A.2** ACTUAL INTEREST EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT  
INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	34 172	25 888	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	11 327 426	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	14 998 360	9 943 209	7 421 194	4 353 828
12.	Jawa Barat	0	0	0	0
13.	Jawa Tengah	331	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	54 966	45 778	19 464	0
15.	Jawa Timur	0	296 036	167 634	4 878 212
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	0	0	31 034
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	64 106	37 126	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	318 270	229 376	146 029	150 000
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	0	0	1 387 266	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>26 763 459</b>	<b>10 585 697</b>	<b>9 167 475</b>	<b>9 413 074</b>

\*) Data APBD

**TABEL 5.A.3** REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE** *ACTUAL SUBSIDIES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011*

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	6 873 157	598 869	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	9 647 815	11 033 095	15 272 310	14 172 000
5.	J a m b i	5 984 070	8 688 823	130 000	370 000
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	1 300 000
7.	Bengkulu	0	0	0	1 000 000
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	993 561	1 251 750	0
10.	Kepulauan Riau	4 176 915	0	0	0
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	20 450 000	10 394 197	12 194 120	51 400 293
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	3 300 000	4 509 360	4 479 600	4 480 000
18.	Nusa Tenggara Barat	8 902 900	6 542 700	4 929 176	5 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	1 882 052	16 721 050	20 623 607	20 623 711
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	3 731 875	8 755 602	1 928 000	3 200 000
29.	Sulawesi Barat	0	2 091 514	700 000	0
30.	M a l u k u	2 193 960	39 875 757	2 498 527	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	Papua Barat	0	0	0	0
33.	P a p u a	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>60 269 587</b>	<b>116 478 816</b>	<b>64 605 959</b>	<b>101 546 004</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 5.A.4

**REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**

**ACTUAL GRANT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	224 051 269	433 398 506	532 841 778	755 092 389
2.	Sumatera Utara	247 062 083	125 559 525	316 329 250	313 239 000
3.	Sumatera Barat	24 627 500	16 760 000	56 700 222	33 378 500
4.	R i a u	210 432 870	144 952 300	148 675 000	229 050 000
5.	J a m b i	3 592 607	7 438 278	64 358 881	19 896 707
6.	Sumatera Selatan	177 447 526	51 422 977	81 473 375	297 818 963
7.	Bengkulu	1 579 000	28 124 859	61 461 173	21 600 000
8.	Lampung	144 369 023	32 877 000	38 365 623	36 172 755
9.	Bangka Belitung	101 747 894	156 610 562	26 406 951	54 253 951
10.	Kepulauan Riau	37 366 477	47 932 814	114 556 707	118 700 000
11.	DKI Jakarta	177 020 390	305 274 309	423 468 762	865 613 817
12.	Jawa Barat	295 623 566	120 587 340	156 022 746	268 887 100
13.	Jawa Tengah	385 489 980	67 953 604	68 261 172	84 461 968
14.	D I Yogyakarta	293 366 860	15 550 887	89 895 292	7 618 834
15.	Jawa Timur	1 283 926 009	540 816 992	682 406 822	974 301 072
16.	Banten	86 405 822	57 693 815	92 374 984	340 463 000
17.	B a l i	117 265 529	15 637 208	190 010 205	216 814 302
18.	Nusa Tenggara Barat	55 103 227	29 666 258	116 432 115	138 594 666
19.	Nusa Tenggara Timur	93 264 088	4 788 548	6 819 140	6 700 000
20.	Kalimantan Barat	750 000	35 712 500	50 451 332	65 525 000
21.	Kalimantan Tengah	882 000	13 646 758	106 724 002	30 725 000
22.	Kalimantan Selatan	210 000	33 257 670	98 645 652	51 131 650
23.	Kalimantan Timur	1 173 155 948	410 142 815	356 170 000	524 627 845
24.	Sulawesi Utara	8 749 940	22 057 250	114 013 707	35 382 877
25.	Sulawesi Tengah	34 289 279	34 174 084	58 608 736	114 809 804
26.	Sulawesi Selatan	0	0	79 196 000	84 095 000
27.	Sulawesi Tenggara	22 973 208	17 724 952	7 860 207	8 700 000
28.	Gorontalo	14 500 850	14 694 719	16 142 400	41 750 000
29.	Sulawesi Barat	6 799 363	5 593 400	10 568 975	53 067 500
30.	M a l u k u	58 587 876	24 566 104	22 417 069	20 850 000
31.	Maluku Utara	18 370 900	11 709 420	11 381 334	1 600 000
32.	Papua Barat	81 727 355	123 634 000	167 638 800	362 185 758
33.	P a p u a	5 630 000	442 780	61 440 130	176 928 500
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>5 386 368 439</b>	<b>2 950 402 234</b>	<b>4 428 118 542</b>	<b>6 354 035 958</b>

\*) Data APBD

**TABEL 5.A.5** REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 5.A.5** ACTUAL SOCIAL AID EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	476 205 553	669 645 983	768 357 850	626 225 798
2.	Sumatera Utara	117 761 735	215 176 817	71 955 050	49 944 000
3.	Sumatera Barat	35 067 065	29 514 325	55 567 604	63 215 920
4.	R i a u	285 311 665	257 669 138	216 582 000	181 981 000
5.	J a m b i	3 282 617	22 222 754	37 191 082	59 369 300
6.	Sumatera Selatan	70 341 184	48 972 750	49 205 523	54 935 681
7.	Bengkulu	13 989 636	147 513 000	20 358 540	11 591 160
8.	Lampung	137 112 682	111 879 041	89 264 670	81 450 000
9.	Bangka Belitung	45 847 668	28 700 827	17 946 771	10 100 000
10.	Kepulauan Riau	47 341 958	72 112 807	74 480 407	92 562 298
11.	DKI Jakarta	329 840 768	58 020 461	27 517 450	58 527 900
12.	Jawa Barat	242 238 519	232 864 154	192 865 500	335 892 519
13.	Jawa Tengah	412 423 156	401 255 901	344 916 345	269 005 980
14.	D I Yogyakarta	77 120 813	96 290 500	88 513 100	105 752 387
15.	Jawa Timur	559 004 250	72 471 414	47 627 536	87 714 900
16.	Banten	36 219 525	48 116 100	51 428 250	51 000 000
17.	B a l i	152 013 312	305 087 740	313 295 312	325 959 800
18.	Nusa Tenggara Barat	110 313 355	84 700 290	96 006 383	107 311 951
19.	Nusa Tenggara Timur	52 224 987	46 753 319	49 739 498	70 660 260
20.	Kalimantan Barat	66 279 882	20 806 946	8 820 600	9 670 000
21.	Kalimantan Tengah	41 543 262	35 149 721	40 211 363	138 796 453
22.	Kalimantan Selatan	91 521 188	110 089 207	100 762 508	81 641 000
23.	Kalimantan Timur	124 691 200	189 786 674	103 863 200	111 012 000
24.	Sulawesi Utara	58 539 064	54 721 180	46 816 745	45 720 000
25.	Sulawesi Tengah	33 138 731	16 407 712	13 923 701	8 200 000
26.	Sulawesi Selatan	151 586 443	73 519 402	25 016 900	22 098 500
27.	Sulawesi Tenggara	19 347 164	10 019 035	75 477 400	19 692 500
28.	Gorontalo	5 701 080	2 992 240	4 266 797	6 000 000
29.	Sulawesi Barat	22 480 763	8 476 557	6 814 352	10 983 350
30.	M a l u k u	39 290 454	35 648 605	23 821 897	28 231 500
31.	Maluku Utara	56 107 261	55 743 894	36 025 107	3 300 000
32.	Papua Barat	222 614 545	201 824 296	137 627 569	89 431 300
33.	P a p u a	534 314 520	500 127 971	391 137 477	237 806 499
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 670 816 005</b>	<b>4 264 280 761</b>	<b>3 627 404 487</b>	<b>3 455 783 956</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 5.A.6 **REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**TABLE** (ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL SHARING FUND EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT**  
**THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	226 171 741	313 843 984	312 466 642	250 000 000
2.	Sumatera Utara	683 336 924	656 050 047	609 775 367	701 000 000
3.	Sumatera Barat	229 537 664	266 352 364	290 666 129	381 850 200
4.	R i a u	378 069 861	530 344 005	459 865 294	573 585 672
5.	J a m b i	198 770 202	172 865 736	222 916 085	189 158 933
6.	Sumatera Selatan	313 837 427	377 068 040	478 165 062	400 000 000
7.	Bengkulu	66 125 836	0	99 105 386	127 660 404
8.	Lampung	415 383 957	407 169 916	378 733 817	353 000 000
9.	Bangka Belitung	102 097 456	106 455 806	115 637 811	123 510 190
10.	Kepulauan Riau	155 581 589	175 274 848	164 514 157	164 995 127
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	1 777 489 318	2 075 846 644	2 064 745 161	2 155 197 969
13.	Jawa Tengah	1 058 172 720	1 108 957 859	1 182 878 413	1 072 413 808
14.	D I Yogyakarta	201 741 159	198 385 862	214 667 402	215 127 693
15.	Jawa Timur	1 452 594 469	1 883 301 032	2 326 860 423	2 229 468 218
16.	Banten	592 012 917	581 405 598	736 769 053	730 617 000
17.	B a l i	289 079 348	453 053 519	485 833 043	475 286 523
18.	Nusa Tenggara Barat	118 225 000	164 138 371	201 232 154	190 666 844
19.	Nusa Tenggara Timur	50 060 997	74 459 462	96 124 597	90 651 227
20.	Kalimantan Barat	166 939 489	218 142 029	237 066 027	252 846 180
21.	Kalimantan Tengah	133 960 232	167 793 818	182 468 533	225 639 395
22.	Kalimantan Selatan	344 000 000	402 276 473	500 000 000	500 000 000
23.	Kalimantan Timur	715 981 590	716 581 090	901 354 888	941 627 500
24.	Sulawesi Utara	107 099 262	136 687 892	137 100 431	172 000 000
25.	Sulawesi Tengah	80 057 810	112 284 226	93 456 633	100 183 626
26.	Sulawesi Selatan	423 728 417	362 740 344	503 954 303	645 842 280
27.	Sulawesi Tenggara	71 578 547	60 160 658	79 660 625	49 176 799
28.	Gorontalo	33 587 580	38 157 153	39 430 333	44 170 912
29.	Sulawesi Barat	21 067 000	22 054 524	29 262 966	35 772 998
30.	M a l u k u	34 803 544	44 793 866	60 881 792	53 515 133
31.	Maluku Utara	33 593 533	21 596 986	31 225 367	33 464 948
32.	Papua Barat	31 356 896	24 592 297	281 843 427	466 300 000
33.	P a p u a	90 127 829	104 319 214	109 328 770	96 039 780
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>10 596 170 314</b>	<b>11 977 153 663</b>	<b>13 627 990 091</b>	<b>14 040 769 359</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 5.A.7

**REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH  
INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL FINANCIAL AIDS EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT  
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	100 000 000	0	150 000 000
2.	Sumatera Utara	186 095 993	420 526 785	313 433 815	304 063 260
3.	Sumatera Barat	249 798 708	58 531 460	172 924 980	66 839 698
4.	R i a u	65 835 387	73 880 000	43 200 000	81 677 500
5.	J a m b i	3 250 000	145 217 847	9 900 000	0
6.	Sumatera Selatan	57 320 000	142 441 358	117 977 676	477 749 540
7.	Bengkulu	1 000 000	3 000 000	3 944 789	4 000 000
8.	Lampung	3 000 000	23 157 821	18 000 000	90 300 000
9.	Bangka Belitung	21 664 442	24 828 964	66 041 565	62 364 965
10.	Kepulauan Riau	3 990 500	5 000 000	8 500 000	8 500 000
11.	DKI Jakarta	0	598 359	1 338 583	1 350 000
12.	Jawa Barat	1 336 996 213	2 250 355 551	2 458 555 862	2 543 871 588
13.	Jawa Tengah	626 139 791	687 190 390	1 116 008 176	1 199 687 250
14.	D I Yogyakarta	46 900 000	76 388 400	56 967 000	67 180 000
15.	Jawa Timur	16 689 728	746 137 792	1 503 834 280	963 160 439
16.	Banten	208 700 000	190 121 605	139 455 065	291 115 815
17.	B a l i	85 650 114	79 755 937	24 486 688	34 294 869
18.	Nusa Tenggara Barat	16 300 000	80 725 984	53 986 075	39 165 431
19.	Nusa Tenggara Timur	53 276 974	59 684 237	46 618 785	23 752 250
20.	Kalimantan Barat	39 824 000	146 523 985	129 787 680	142 318 876
21.	Kalimantan Tengah	25 769 815	14 491 572	18 927 354	47 490 700
22.	Kalimantan Selatan	10 500 000	43 720 897	18 650 302	24 875 000
23.	Kalimantan Timur	1 496 655 000	1 650 627 262	1 170 081 992	1 250 566 550
24.	Sulawesi Utara	29 500 000	6 000 000	4 000 000	5 780 000
25.	Sulawesi Tengah	41 620 773	45 845 879	47 504 113	34 504 113
26.	Sulawesi Selatan	329 563 873	318 120 459	389 647 141	452 780 126
27.	Sulawesi Tenggara	108 046 245	70 729 017	120 671 756	281 114 213
28.	Gorontalo	9 692 195	8 554 797	30 930 988	7 500 000
29.	Sulawesi Barat	817 400	0	0	3 618 000
30.	M a l u k u	3 000 000	4 052 260	966 655	3 019 332
31.	Maluku Utara	271 830	0	0	900 000
32.	Papua Barat	170 334 400	982 925 220	824 959 436	960 737 862
33.	P a p u a	2 537 008 414	1 723 487 561	1 640 726 759	1 653 377 659
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>7 785 211 795</b>	<b>10 182 621 399</b>	<b>10 552 027 515</b>	<b>11 277 655 036</b>

\*) Data APBD



**TABEL 5.A.8** REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE 5.A.8** ACTUAL UNPREDICTED EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT  
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	0	2 079 870	6 379 504	50 000 000
2.	Sumatera Utara	342 822	2 600 000	700 000	20 000 000
3.	Sumatera Barat	118 745	2 424 510	3 046 069	5 000 538
4.	R i a u	17 264 445	1 100 000	10 000 000	10 000 000
5.	J a m b i	283 000	2 674 835	1 629 707	3 500 000
6.	Sumatera Selatan	1 330 635	566 036	586 725	5 000 000
7.	Bengkulu	6 645 842	6 466 656	7 399 467	38 925 000
8.	Lampung	19 084 798	91 557 661	27 357 876	22 358 391
9.	Bangka Belitung	0	500 000	899 150	1 259 300
10.	Kepulauan Riau	531 500	1 800 000	300 000	500 000
11.	DKI Jakarta	3 081 395	0	0	83 078 470
12.	Jawa Barat	13 585	1 650	563 480	35 000 000
13.	Jawa Tengah	1 024 356	5 158 758	15 065 275	25 000 000
14.	D I Yogyakarta	1 059 869	0	2 735 672	10 000 000
15.	Jawa Timur	23 803 349	686 620	25 257 155	41 112 373
16.	Banten	2 484 475	2 000 000	4 120 000	5 000 000
17.	B a l i	31 104	5 562 204	12 873 556	54 656 457
18.	Nusa Tenggara Barat	50 000	872 920	1 315 085	2 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	8 157 923	6 005 519	8 096 830	10 000 000
20.	Kalimantan Barat	0	69 701	1 558 270	4 286 500
21.	Kalimantan Tengah	31 797	150 500	1 573 625	81 732 923
22.	Kalimantan Selatan	2 147 500	2 091 161	2 209 149	3 000 000
23.	Kalimantan Timur	1 000 000	14 375	0	15 000 000
24.	Sulawesi Utara	337 898	2 253 858	1 298 176	10 000 000
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	5 000 000
26.	Sulawesi Selatan	3 751 208	595 680	2 378 297	15 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	4 890 320	1 105 456	1 947 932	5 000 000
28.	Gorontalo	50 000	250 000	152 357	5 000 000
29.	Sulawesi Barat	4 372 365	461 981	1 094 825	2 000 000
30.	M a l u k u	22 185 347	8 613 557	1 585 445	33 895 000
31.	Maluku Utara	168 500	940 000	500 000	500 000
32.	Papua Barat	0	0	2 000 000	5 000 000
33.	P a p u a	82 818 210	48 187 817	5 710 600	21 267 600
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>207 060 988</b>	<b>196 791 325</b>	<b>150 334 227</b>	<b>629 072 552</b>

\*) Data APBD

**TABEL 5.B** REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**TABLE** **5.B** **ACTUAL DIRECT EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	4 316 396 527	5 444 184 777	5 167 329 622	5 338 387 438
2.	Sumatera Utara	1 172 966 429	1 378 366 514	1 675 233 409	2 646 109 276
3.	Sumatera Barat	731 349 975	887 581 198	1 208 009 760	1 006 471 449
4.	R i a u	2 196 798 941	2 116 774 369	2 633 808 101	2 637 054 966
5.	J a m b i	893 258 408	844 896 912	815 863 303	846 426 859
6.	Sumatera Selatan	1 371 235 221	1 292 350 129	1 940 919 350	1 809 758 497
7.	Bengkulu	932 780 371	539 471 542	449 562 954	581 692 510
8.	Lampung	648 996 390	793 750 676	1 036 457 939	1 090 584 311
9.	Bangka Belitung	400 498 444	406 635 485	482 838 623	611 178 825
10.	Kepulauan Riau	770 873 667	1 369 537 165	1 198 234 307	1 408 702 834
11.	DKI Jakarta	9 755 457 813	13 251 881 680	14 580 144 679	18 341 494 454
12.	Jawa Barat	1 567 365 516	2 501 857 027	2 754 875 029	2 766 834 629
13.	Jawa Tengah	1 802 604 949	1 988 013 501	2 171 519 886	2 228 186 583
14.	D I Yogyakarta	537 540 673	630 565 465	566 102 212	741 667 293
15.	Jawa Timur	1 881 485 690	3 283 139 576	4 336 571 471	4 828 721 360
16.	Banten	1 088 746 693	1 247 059 419	1 529 948 052	1 721 198 329
17.	B a l i	439 693 880	520 146 882	489 691 916	762 188 088
18.	Nusa Tenggara Barat	449 099 055	375 984 593	416 441 760	721 360 699
19.	Nusa Tenggara Timur	498 580 794	532 633 795	609 729 330	684 218 640
20.	Kalimantan Barat	799 332 607	876 021 859	926 017 322	965 116 094
21.	Kalimantan Tengah	855 132 640	975 028 246	854 581 382	838 102 705
22.	Kalimantan Selatan	780 240 584	1 142 592 296	1 267 561 372	1 361 524 546
23.	Kalimantan Timur	2 551 506 899	2 985 472 214	2 981 776 194	3 916 275 708
24.	Sulawesi Utara	415 829 754	515 919 011	505 382 406	608 502 825
25.	Sulawesi Tengah	540 498 372	592 355 452	622 558 234	623 009 217
26.	Sulawesi Selatan	811 882 058	885 292 826	985 647 855	1 124 604 637
27.	Sulawesi Tenggara	450 469 558	673 428 860	527 876 246	663 445 162
28.	Gorontalo	352 771 575	409 334 481	308 996 973	359 456 670
29.	Sulawesi Barat	412 313 051	486 381 131	482 033 514	468 529 041
30.	M a l u k u	413 984 128	631 377 457	571 608 481	642 190 454
31.	Maluku Utara	377 283 949	526 245 692	439 753 927	506 247 778
32.	Papua Barat	1 057 922 986	1 298 078 469	1 581 127 628	1 421 401 037
33.	P a p u a	1 937 565 080	2 332 117 851	2 882 718 795	2 388 153 783
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>43 212 462 677</b>	<b>53 734 476 550</b>	<b>59 000 922 032</b>	<b>66 658 796 697</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 5.B.1

**REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH PROVINSI SELURUH  
INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL DIRECT PERSONNEL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT  
THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	167 960 961	288 692 582	295 570 080	291 231 599
2.	Sumatera Utara	145 590 665	161 214 215	138 095 739	176 940 549
3.	Sumatera Barat	55 511 523	66 105 352	79 094 896	92 216 375
4.	R i a u	401 647 794	288 674 411	330 284 401	220 810 585
5.	J a m b i	54 733 496	50 985 048	53 961 942	67 036 939
6.	Sumatera Selatan	154 123 673	302 708 009	476 970 696	170 138 325
7.	Bengkulu	53 699 610	75 619 091	44 005 108	65 481 079
8.	Lampung	77 346 004	73 709 559	84 733 817	140 613 096
9.	Bangka Belitung	59 478 732	41 743 919	33 420 443	34 224 947
10.	Kepulauan Riau	81 887 760	219 272 896	179 428 467	191 410 018
11.	DKI Jakarta	1 918 187 026	1 672 843 080	2 024 843 081	1 212 460 197
12.	Jawa Barat	269 672 718	356 753 290	255 873 493	325 901 429
13.	Jawa Tengah	250 055 680	213 820 985	209 968 578	206 957 607
14.	D I Yogyakarta	77 683 468	86 714 402	98 929 829	91 459 903
15.	Jawa Timur	21 201 965	483 186 941	668 598 067	833 869 936
16.	Banten	138 702 929	106 741 193	110 267 532	130 439 190
17.	B a l i	40 754 468	35 605 364	18 489 741	30 571 442
18.	Nusa Tenggara Barat	58 036 638	45 188 420	55 334 233	40 506 185
19.	Nusa Tenggara Timur	56 200 520	45 453 468	60 105 893	77 935 879
20.	Kalimantan Barat	61 463 897	61 145 490	58 641 977	77 003 473
21.	Kalimantan Tengah	52 027 335	56 373 955	60 521 483	94 916 357
22.	Kalimantan Selatan	95 360 699	78 666 387	97 580 931	120 286 044
23.	Kalimantan Timur	342 289 063	416 481 970	472 870 254	581 606 506
24.	Sulawesi Utara	73 784 960	38 377 867	48 481 823	55 793 399
25.	Sulawesi Tengah	48 331 512	58 952 351	59 207 689	69 135 573
26.	Sulawesi Selatan	101 518 645	121 502 604	122 037 635	141 765 239
27.	Sulawesi Tenggara	77 721 452	111 288 327	64 253 626	40 522 603
28.	Gorontalo	27 651 146	24 664 746	21 769 939	30 439 243
29.	Sulawesi Barat	56 256 109	45 749 520	56 863 864	58 307 117
30.	M a l u k u	52 043 712	74 958 073	54 342 524	59 092 086
31.	Maluku Utara	39 221 245	63 777 116	39 362 004	24 099 043
32.	Papua Barat	55 797 078	67 839 852	78 071 808	107 563 658
33.	P a p u a	206 297 330	240 640 555	217 653 418	214 227 444
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>5 372 239 813</b>	<b>6 075 451 038</b>	<b>6 669 635 011</b>	<b>6 074 963 065</b>

\*) Data APBD

**TABEL 5.B.2** REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SELURUH  
**INDONESIA (ribu rupiah), 2008-2011**  
**TABLE 5.B.2** ACTUAL GOODS AND SERVICES EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT  
**THROUGHOUT INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	1 538 708 908	1 459 188 116	1 603 848 155	3 424 369 848
2.	Sumatera Utara	447 635 101	512 815 247	820 332 048	1 146 619 468
3.	Sumatera Barat	313 735 522	359 444 050	545 847 300	463 860 545
4.	R i a u	599 884 464	708 706 089	882 439 925	1 006 646 514
5.	J a m b i	278 270 196	348 230 502	296 041 040	361 098 882
6.	Sumatera Selatan	325 529 562	348 977 879	430 678 144	596 000 334
7.	Bengkulu	490 766 233	214 738 228	240 495 882	286 514 807
8.	Lampung	362 818 709	486 751 068	525 914 922	450 802 232
9.	Bangka Belitung	105 828 477	126 756 627	136 056 175	152 386 704
10.	Kepulauan Riau	399 783 218	426 505 931	367 237 269	398 514 203
11.	DKI Jakarta	5 255 670 595	6 773 237 465	7 312 154 901	9 071 099 996
12.	Jawa Barat	943 386 901	1 418 622 576	1 443 464 795	1 675 660 380
13.	Jawa Tengah	1 022 442 666	1 227 133 928	1 542 074 984	1 592 170 854
14.	D I Yogyakarta	268 023 479	350 913 012	339 709 271	500 033 871
15.	Jawa Timur	1 311 774 043	1 962 652 643	2 790 096 474	3 094 388 943
16.	Banten	356 095 626	457 752 098	593 057 823	937 361 151
17.	B a l i	276 840 973	277 484 606	269 734 074	363 509 633
18.	Nusa Tenggara Barat	217 322 931	196 983 101	216 550 122	281 622 830
19.	Nusa Tenggara Timur	239 658 532	281 930 798	373 064 516	412 316 328
20.	Kalimantan Barat	327 122 350	450 379 483	490 478 825	525 733 914
21.	Kalimantan Tengah	229 465 902	291 817 269	252 766 611	325 019 502
22.	Kalimantan Selatan	282 988 393	437 269 809	492 679 168	607 267 535
23.	Kalimantan Timur	554 858 140	705 567 895	854 936 271	1 340 775 744
24.	Sulawesi Utara	184 703 131	236 257 494	292 540 520	329 125 215
25.	Sulawesi Tengah	289 497 279	321 587 887	359 558 245	378 369 365
26.	Sulawesi Selatan	435 182 478	467 927 554	559 961 996	597 016 212
27.	Sulawesi Tenggara	222 612 223	260 377 147	228 258 763	210 936 035
28.	Gorontalo	168 193 654	206 395 928	178 230 008	216 489 472
29.	Sulawesi Barat	146 120 254	198 827 504	220 105 790	217 458 715
30.	M a l u k u	212 297 387	384 271 757	358 404 729	352 231 418
31.	Maluku Utara	158 556 450	209 412 283	207 866 680	214 121 047
32.	Papua Barat	295 498 032	411 425 727	507 173 804	726 660 595
33.	P a p u a	682 075 010	891 988 195	1 260 514 917	1 218 323 412
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>18 943 346 819</b>	<b>23 412 329 896</b>	<b>26 992 274 147</b>	<b>33 474 505 704</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 5.B.3 **REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**TABLE** 5.B.3 **(ribu rupiah), 2008-2011**  
**ACTUAL CAPITAL EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	2 609 726 658	3 696 304 079	3 267 911 387	1 622 785 991
2.	Sumatera Utara	579 740 663	704 337 052	716 805 622	1 322 549 259
3.	Sumatera Barat	362 102 930	462 031 796	583 067 564	450 394 529
4.	R i a u	1 195 266 683	1 119 393 869	1 421 083 775	1 409 597 867
5.	J a m b i	560 254 716	445 681 362	465 860 321	418 291 038
6.	Sumatera Selatan	891 581 986	640 664 241	1 033 270 510	1 043 619 838
7.	Bengkulu	388 314 528	249 114 223	165 061 964	229 696 624
8.	Lampung	208 831 677	233 290 049	425 809 200	499 168 983
9.	Bangka Belitung	235 191 235	238 134 939	313 362 005	424 567 174
10.	Kepulauan Riau	289 202 689	723 758 338	651 568 571	818 778 613
11.	DKI Jakarta	2 581 600 192	4 805 801 135	5 243 146 697	8 057 934 261
12.	Jawa Barat	354 305 897	726 481 161	1 055 536 741	765 272 820
13.	Jawa Tengah	530 106 603	547 058 588	419 476 324	429 058 122
14.	D I Yogyakarta	191 833 726	192 938 051	127 463 112	150 173 519
15.	Jawa Timur	548 509 682	837 299 992	877 876 930	900 462 481
16.	Banten	593 948 138	682 566 128	826 622 697	653 397 988
17.	B a l i	122 098 439	207 056 912	201 468 101	368 107 013
18.	Nusa Tenggara Barat	173 739 486	133 813 072	144 557 405	399 231 684
19.	Nusa Tenggara Timur	202 721 742	205 249 529	176 558 921	193 966 433
20.	Kalimantan Barat	410 746 360	364 496 886	376 896 520	362 378 707
21.	Kalimantan Tengah	573 639 403	626 837 022	541 293 288	418 166 846
22.	Kalimantan Selatan	401 891 492	626 656 100	677 301 273	633 970 967
23.	Kalimantan Timur	1 654 359 696	1 863 422 349	1 653 969 669	1 993 893 458
24.	Sulawesi Utara	157 341 663	241 283 650	164 360 063	223 584 211
25.	Sulawesi Tengah	202 669 581	211 815 214	203 792 300	175 504 279
26.	Sulawesi Selatan	275 180 935	295 862 668	303 648 224	385 823 186
27.	Sulawesi Tenggara	150 135 883	301 763 386	235 363 857	411 986 524
28.	Gorontalo	156 926 775	178 273 807	108 997 026	112 527 955
29.	Sulawesi Barat	209 936 688	241 804 107	205 063 860	192 763 209
30.	M a l u k u	149 643 029	172 147 627	158 861 228	230 866 950
31.	Maluku Utara	179 506 254	253 056 293	192 525 243	268 027 688
32.	Papua Barat	706 627 876	818 812 890	995 882 016	587 176 784
33.	P a p u a	1 049 192 740	1 199 489 101	1 404 550 460	955 602 927
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>18 896 876 045</b>	<b>24 246 695 616</b>	<b>25 339 012 874</b>	<b>27 109 327 928</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 5.C

**REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
(ribu rupiah), 2008-2011  
**ACTUAL FINANCING EXPENDITURE OF PROVINCIAL GOVERNMENT THROUGHOUT**  
**INDONESIA (thousand rupiahs), 2008-2011**

No.	Provinsi/Province	2008	2009	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	A c e h	4 337 873 301	2 415 001 063	1 282 287 393	294 028 927
2.	Sumatera Utara	652 761 352	378 589 070	565 463 428	190 917 706
3.	Sumatera Barat	344 106 415	682 866 528	355 105 212	74 479 901
4.	R i a u	973 073 220	345 508 122	194 000 000	70 000 000
5.	J a m b i	390 886 774	210 128 877	353 260 385	370 000
6.	Sumatera Selatan	288 684 451	345 043 084	431 373 607	20 939 181
7.	Bengkulu	278 702 464	200 570 145	40 232 218	12 758 970
8.	Lampung	192 341 218	78 951 378	165 814 010	6 000 000
9.	Bangka Belitung	319 465 870	266 136 770	249 439 075	0
10.	Kepulauan Riau	391 953 213	2 600 000	372 188 859	5 440 000
11.	DKI Jakarta	4 629 488 116	4 197 955 215	5 221 603 301	631 928 300
12.	Jawa Barat	2 514 361 693	2 049 472 840	2 511 336 444	37 698 800
13.	Jawa Tengah	889 050 921	1 180 364 556	1 562 639 507	190 000 000
14.	D I Yogyakarta	342 384 028	244 404 316	276 179 393	32 115 000
15.	Jawa Timur	2 595 366 864	2 286 902 536	1 769 981 099	138 525 000
16.	Banten	246 501 923	252 995 508	540 362 606	11 400 000
17.	B a l i	485 619 400	559 236 657	790 310 153	0
18.	Nusa Tenggara Barat	94 843 371	136 896 845	69 986 315	65 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	272 170 957	266 235 727	164 101 590	82 483 000
20.	Kalimantan Barat	247 569 386	173 032 329	251 734 083	35 000 000
21.	Kalimantan Tengah	176 028 684	42 057 470	135 963 494	79 062 978
22.	Kalimantan Selatan	599 769 551	553 537 508	362 341 273	97 000 000
23.	Kalimantan Timur	2 132 356 631	1 046 876 135	1 934 557 684	150 000 000
24.	Sulawesi Utara	437 153 668	388 025 574	368 273 478	2 000 000
25.	Sulawesi Tengah	195 751 546	182 111 792	227 405 397	6 700 000
26.	Sulawesi Selatan	207 773 765	237 264 440	308 364 369	11 700 000
27.	Sulawesi Tenggara	120 210 611	35 484 949	35 683 286	126 029 592
28.	Gorontalo	128 134 197	65 134 763	91 405 185	25 000 000
29.	Sulawesi Barat	60 818 581	23 960 693	25 926 974	- 10 023 665
30.	M a l u k u	68 106 192	57 602 183	60 765 218	4 950 000
31.	Maluku Utara	57 268 676	7 361 950	15 978 309	12 716 389
32.	Papua Barat	49 284 435	152 249 179	432 191 073	25 025 420
33.	P a p u a	6 411 009	943 623 400	153 364 209	185 000 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>24 726 272 483</b>	<b>20 008 181 602</b>	<b>21 319 618 627</b>	<b>2 614 245 499</b>

\*) Data APBD

# **STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI 2008-2011**

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Adi Lumaksono, MA

Editor : Wikaningsih, SE

Penulis : Agus Nuwibowo, S.Si, MM  
Desy Apresziyanti, SST

Pengolah Data : Hasan As'ari, S.Si, ME  
Ruri Kartika Sari

<http://www.bps.go.id>







# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710  
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046  
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpsdq@bps.go.id](mailto:bpsdq@bps.go.id)

